

**POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KEL.
WATES KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1) Jurusan

Ilmu Politik



Oleh

Muhammad Akbar Ari P
1906016063

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

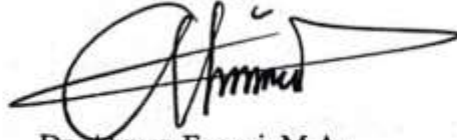
SKRIPSI

**POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KEL.
WATES KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

Di Susun oleh
M Akbar Ari Pratama
1906016063

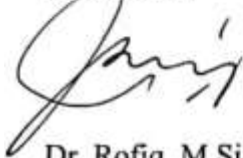
Telah di pertahankan di depan mejelis penguji skripsi
Pada tanggal 26 juni 2023

KETUA



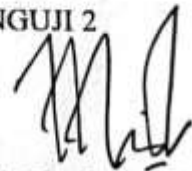
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
197701202005011005

PENGUJI 1



Dr. Rofiq, M.Si
197303052016011901

PENGUJI 2



Moh. Nuqlir Bariklana, M.Si
198505022019031007

Mengetahui Pembimbing,



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
197701202005011005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada. Yth. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Akbar Ari Pratama

NIM : 1906016063

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Distributif Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM)
di Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Ahwan Fanani, M.A.g

NIP. 197809302003121001

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Akbar Ari Pratama menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Politik Distributif Bantuan Langsung Tunai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022" merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juni 2023
Penulis

M. AKBAR ARI PRATAMA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Politik Distributif Bantuan Langsung Tunai Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang lebih terang. Skripsi ini disusun dan diselesaikan oleh penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Strata Satu (S.Sos) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kesehatan untuk penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. Muhammad Mahsun, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
9. Supiyah Suharni, S.H. selaku Lurah Wates, tak lupa beserta dengan staf jajarannya dan masyarakat Kelurahan Wates yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian ini dengan sangat baik dan ramah sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Terima Kasih Kepada Rekan Seperjuangan Pondok Pesantren Al Ihya Yakni, Izzudin, Hawin, Yoga, Fadil, Fauzan yang telah mendukung dan mengingatkan akan segera menyelesaikan studi di UIN Walisongo.
11. Terima kasih Kepada Rekan Seperjuangan Organisasi Menwa yakni Ryan, Niar, Sabrina, beserta Keluarga Besar Menwa UIN Walisongo yang selalu mensupport penulis agar tulisan ini cepat selesai.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat untuk penulis khususnya ataupun untuk orang lain. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



M AKBAR ARI PRATAMA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta

Keluarga Besar Gumay Talang

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya”

QS Al Baqarah 286

ABSTRAK

Proses pendataan warga yang berhak menerima bansos serta masuk dalam data DTKS adalah Tanggung jawab dari pemerintah Kelurahan, Akan tetapi dalam Pelaksanaannya tidak selalu mendapati jalan yang mulus. Banyak di temukannya pendistribusian yang kurang tepat sasaran dan terkesan pemberian bansos hanya kepada basis wilayah tertentu, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antar warga khususnya yang saat ini peneliti teliti pada Kelurahan Wates. Sehingga peneliti memiliki tujuan untuk meneliti dan mendalami masalah tersebut, tentang apa yang melatar belakangi munculnya masalah tersebut secara laangsung di lapangan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yakni dilakukan dengan cara menganalisis data-data primer yang didapatkan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang dibutuhkan. Narasumber yang diperoleh merupakan pihak yang memahami tentang pendataan baksos Bansos BLT BBM. Penelitian ini menggunakan teori Politik Distributif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan mengenai pelaksanaan program BLT BBM di Kelurahan Wates serta bagaimana memahami Mekansime Penyaluran Bansos BLT BBM dan bagaimana jika dilihat dari sudut pandang Teori Politik Distributif

Hasil penelitian dalam pelaksanaan pendataan warga yang berhak menerima bantuan program Bansos BLT BBM di Kelurahan Wates. Pertama, di dalam mekansisme pendataan warga yang berhak menerima bantuan, terdapat Peran non kelurahan yakni peran dari ibu ibu PKK yang di anggap menimbulkan kecemburaan, karna kelurahan di anggap tidak mempercai penuh data dari RT dan RW yang mana keduanya menjadi garda terdepan dari warganya. Terdapat forum ibu ibu PKK yang fokus membahas tentang penyaringan warga yang berhak menerima bantuan atau masuk dalam data DTKS. Ketiga, hadirnya ibu ibu PKK dalam penyaringan warga yang berhak menerima bansos, tak lepas dari peran Pejabat Kelurahan yakni Bu Lurah dimana kebijakan ini melibatkan ibu ibu PKK, adalah suatu hal yang baru dan berbeda dari Intruksi Kemensos dan Kelurahan atau desa lain pada umumnya. Serta pembagian bansos yang terkesan pada basis wilayah tertentu yakni alokasinya terbanyak berada pada RW 03 dan RW 02 yang menjadi warga yang aktif PKKnya dan aktif dalam membantu kegiatan Kelurahan serta basis tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Kelurahan, Politik Distributif, Bansos, BLT BBM

ABSTRACT

The process of collecting data on residents who are entitled to receive assistance and to be included in the DTKS data is the responsibility of the Kelurahan government, however, the implementation does not always go smoothly. There were many distributions that were not on target and it seemed that social assistance was only given to certain regional bases, causing social jealousy among residents. Especially what researchers are currently researching is the Wates Village. So that researchers are interested in researching and exploring these problems and what is the reason behind the emergence of these problems.

The research method used in this study is a qualitative research method. The research is carried out by analyzing the primary data obtained. Primary data obtained from the results of in-depth interviews with the required sources. The sources obtained were parties who understood the data collection for Social Assistance Services BLT BBM. This study uses the theory of Distributive Politics with the aim of describing and explaining the problems regarding the implementation of the BLT BBM program in the Wates Village and how to understand the Social Assistance Distribution Mechanism of BLT BBM and what if seen from the perspective of programmatic and non-programmatic distributive politics abstinence

The results of the research in the implementation of data collection on residents who are entitled to receive assistance from the BLT BBM Social Assistance program in the Wates Village. First, in the mechanism for collecting data on residents who are entitled to receive assistance, there is a non-kelurahan role, namely the role of PKK women who are considered to cause jealousy, because households are considered not to fully trust data from RT and RW, both of which are the front guard of their citizens. There is a PKK women's forum that focuses on discussing the screening of citizens who are entitled to receive assistance or to be included in the DTKS data. Third, the presence of PKK women in screening residents who are entitled to receive social assistance, cannot be separated from the role of Kelurahan officials, namely the Lurah where this policy involves PKK women, is something new and different from the instructions of the Ministry of Social Affairs and Kelurahan or other villages in general. As well as the distribution of data collection that can be seen on a certain regional basis, namely the largest allocation is in RW 03 and RW 02 which are residents who are active in the PKK and are active in assisting Kelurahan activities and the base of community leaders.

Keywords: Kelurahan Government, Distributive Politics, Social Assistance, BLT BBM

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat teoritis.....	4
2. Manfaat praktis.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	9
2. Sumber Data	11
G. Teknik Pengumpulan Data	11
1. Wawancara.....	11
2. Observasi	12
3. Dokumentasi.....	12
H. Analisis data	12
1. Reduksi Data.....	13
2. Penyajian Data.....	13
3. Verifikasi.....	13
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORI	15

A. Politik Distributif.....	15
1. Politik Distribusi Programatis	17
2. Distribusi Non Programatic.....	19
Dalam Politik Distributif Non Pragramatis di bagi menjadi 2 bagian yakni :.....	19
a. Klientilisme	19
b. Bias Partisan.....	19
B. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.....	22
C. Sejarah Bantuan Langsung Tunai	23
D. Sejarah Bantuan Langsung Tunai di Indonesia	23
BAB III.....	26
GAMBARAN UMUM.....	26
A. KOTA SEMARANG	26
1. Kondisi Geografis Kota Semarang.....	26
2. Kondisi Demografi Kota Semarang	27
3. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang.....	29
B. Kelurahan Wates	33
1. Data Demografi Kelurahan Wates	34
C. Struktur Organisasi Kelurahan Wates	39
1. Lurah.....	39
2. Sekertaris Lurah.....	40
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos)	40
4. Pengelola Tata Belanja dan Keuangan	41
5. Staf Pelayanan	42
6. Petugas K3.....	42
D. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).....	42
BAB IV	44
A. Latar Belakang Program BLT BBM	44
B. Maksud dan Tujuan Program BLT BBM	44
C. Kriteria Penerima BLT BBM	45
D. Nilai dan Waktu Penyaluran BLT BBM	47
E. Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai BBM di Kelurahan Wates	47
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos).....	48
2. Informasi Teknologi Kelurahan.....	50
3. PSM Kelurahan.....	51

4. RT dan RW	52
5. Peranan PKK	53
6. PT POS INDONESIA.....	55
F. Mekanisme Pelaksanaan BLT BBM di Kelurahan Wates	57
1. Pendataan Warga.....	57
2. Mekanisme Pelaksanan Bantuan Sosial BLT BBM	57
BAB V.....	61
A. Politik Distributif programatis	61
1. Petugas Pelaksana Program BLT BBM di Kelurahan Wates.....	61
2. Informasi bersifat Formal dan publik.	63
3. Pendistribusi Bersifat Sumber Daya manfaat bagi Masyarakat.	64
4. Politik Distributif Non Programatis.....	66
BAB VI	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN PENELITIAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang.....	28
Tabel 3.2 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang.....	31
Tabel 3.3 Kelompok Umur di Kelurahan Wates	34
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikann di Kelurahan Wates.....	35
Tabel 3.5 Jenis Pekerjaan di Kelurahan Wates	36
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Wates	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Politik Distributif.....	30
Gambar 2.2 Jenis Politik Distributif.....	16
Gambar 3.1 Peta Kelurahan Wates.....	33
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kelurahan.....	39
Gambar 4.1 Dokumentasi Penyaluran Bansos BLT BBM.....	56
Gambar 5.1 Info Penyalurab Bansos BLT BBM.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya warga Indonesia telah mendengar berita kenaikan harga BBM. Terus terang, orang yang menggunakan bahan bakar minyak untuk mengemudi dalam kehidupan sehari-hari tidak menyukai berita ini. Sesederhana BBM, namun kebutuhannya besar dan terus-menerus, kenaikan harga sudah menjadi persoalan kompleks dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografi politik yang tidak stabil setelah meletusnya konflik Rusia-Ukraina yang belum akan selesai dan ditambah pasca COVID-19, serta kenaikan harga minyak dunia.

Konflik diantara kedua negara yakni Rusia serta Ukraina mempunyai dampak amat mendalam bagi pasar global. Negara Rusia yang kita ketahui adalah pengeksport gas alam terbanyak dan terbesar urutan kedua di seluruh dunia, pengeksport batu bara terbanyak ketiga, dan produsen dan pengeksport minyak terbanyak urutan ketiga. Disamping itu, Ukraina memainkan peran penting untuk memasok *market* internasional yang memiliki peran sebagai pengeksport jagung terbesar keempat, pengeksport gandum terbesar kelima, dan pengeksport minyak bunga matahari terbesar. Lebih dari 37% impor migas mengalir ke Asia Tenggara, menjadikan kedua negara ini penyedia penting bagi negara-negara defisit seperti kawasan itu. Perang yang sebenarnya meningkatkan harga minyak global secara absolut, yang berdampak pada Asia Tenggara. Tentu saja, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga berdampak pada sektor ekonomi. dan pastinya konflik perang Rusia dan Ukraina akan bermuara pada penataan kembali perdagangan internasional dan negara-negara yang mempunyai ikatan dengan Rusia dan Ukraina sehingga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan nasional negaranya. Penggangguan rantai pasokan global, kenaikan harga energi dan pangan, serta kenaikan harga bahan bakar minyak di beberapa negara, adalah beberapa dampak langsung dari konflik di Rusia-Ukraina bagi Negara Asia Tenggara. (Connie Rahakundini Bakrie, 2022, p. 65)

Dengan demikian, perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang signifikan pada banyak bidang, menyebabkan reorganisasi ekonomi global dan nasional. Indonesia merasakan dampaknya dengan cepat. Harga bahan bakar nasional telah mengalami perubahan. Pada awalnya, subsidi Pertalite dapat di beli seharga Rp7.650 per liter dan naik hingga sekarang menjadi Rp10.000 per liter, subsidi solar dapat di beli dengan harga Rp5.150 per liter dan naik menjadi Rp6.800 per liter, dan subsidi Pertamax dapat di beli dengan harga Rp12.500 per liter naik menjadi Rp14.500 per liter. (indonesiabaik.id)

Maka dengan munculnya kenaikan harga BBM bersubsidi, maka aparat pemerintah melakukan strategi dengan memberikan Bantuan Langsung Uang (BLT) untuk BBM, sebagai usaha pemerintah guna untuk meeringankan beban masyarakat ekonomi golongan bawah, agar dapat mendapatkan bahan bakar minyak dengan efektif dan cepat. secara yang jelas. Seperti yang ditunjukkan oleh informasi pemerintah, hanya 30% bahan bakar bersponsor yang berjalan sesuai rencana. Sementara yang tidak berhak menikmati sisanya. Sebagian besar bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan pribadi berarti terbuang sia-sia di jalanan. Reyhan Noor,

Menurut kajian yang telah dilakukan, BLT justru lebih efektif karena penerima intervensi lebih mudah dilihat. Hal itu ditegaskan Laboratorium Pemerhati Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia 45 (LAB 45) yang dilantik Presiden Jokowi. Pemerintah memiliki akses ke database yang dapat memberikan BLT, tetapi tingkat keakuratan data perlu dipikirkan kembali. (Kompas.com)

Kemudian di dalam mengelola data dan mengeksekusi bantuan tunai tentu adanya pengaturan pendistribusian oleh tata cara pelaksanaan atau politik distributif. mengenai Perspektif politik distributif dalam mengelola sumber daya negara yakni sejenis dengan BLT BBM adalah Hibah. Contoh prodamas pemberian subsidi di Kota Kediri dipandang menjadi strategi politik yang dirancang bawaan penduduk guna bertanding dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 . Pasalnya, setiap RT kini memiliki akses 100 juta per tahun, naik dari 50 juta. Kedua, Musrenbang harus mengecilkan partisipasi masyarakat daripada menciptakan program baru seperti Prodamas. Ketiga, Dana Prodamas biasanya tidak dapat digunakan. Petunjuknya, jika pada tahun pertama RT sudah menguasai kebutuhan pembangunan kerangkanya,

pada tahun berikutnya kebutuhan pondasi sudah tidak penting lagi bagi RT. Keempat, sosialisasi Prodamas Plus dengan tawaran penambahan dana hingga 100 persen jauh sebelum masa kampanye dinilai sebagai manuver politik petahana menegaskan bahwa Prodamas digunakan sebagai alat politik petahana. Menurut pembuatnya, interaksinya Prodamas adalah, program yang disiapkan oleh penghuni untuk menyampaikan aset yang ada ke daerah setempat dengan kedok kerja sama. (Haliim, 2019, p. 11)

Fokus Penelitian yang penulis ambil pada penelitian kali ini adalah tentang pendataan warga yang berhak menerima bansos atau yang masuk dalam data DTKS. Proses pendataan warga yang berhak menerima bantuan serta masuk dalam data DTKS adalah Tanggung jawab dari pemerintah Kelurahan, Akan tetapi dalam Pelaksanaannya tidak selalu mendapati jalan yang mulus banyak masalah kritik dan masukan yang datang. Di samping itu Banyak di temukannya pendistribusian yang kurang tepat sasaran dan terkesan pemberian bansos hanya kepada basis wilayah tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antar warga khususnya yang saat ini peneliti teliti pada Kelurahan Wates.

Dengan Demikian peneliti tertarik untuk meneliti dan medalami masalah tersebut dengan mencari tahu bagaiman mekansime pelaksanaan Program BLT BBM dan apa yang melatar belakangi munculnya masalah tersebut Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa di Kelurahan Wates Terdapat Model Politik Distributif yang berbeda pada kelurahan lainya. Dalam hal ini pada Partisipasi politik diluar petugas bentukan kelurahan ataupun non Kelurahan untuk menangani pendataan mengenai distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Yakni mana saat ini peneltii ketahui adalah terdapat peran dari PKK sebagai lembaga non kelurahan yang ikut serta dalam menyaring warga KPM dan warga yang berhak masuk dalam data DTKS sebagai Penerima Bansos.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran BLT BBM di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022?
2. Bagaimana Pola Politik Distributif BLT BBM yang terjadi di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan diambil dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang di bawa oleh pemerintahan ini sampai ke desa apakah berjalan sesuai arahan atau melenceng dari tujuan utamanya.
2. Untuk mengungkap Bagaimana dampak Pola Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT)BBM pada warga kelurahan Wates.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam pennulisan penelitian ini semoga dapat meninggalkan kontribusi dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk menambah referensi dan pengetahuan dalam ilmu akademik, khususnya di bidang politik pemerintahan dan politik kebijakan pengentasan kemiskinan. Penulis berharap karya ini bisa menjadikan literasi kajian dan bahan kajian-kajian nan fokus pada program pengentasan kemiskinan serta dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat, khususnya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

2. Manfaat praktis

Penulis harapkan karya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu kepada masyarakat luas terkait apa itu Bansos BLT BBM , bagaimana mekanisme dilapangan terutama di tingkat kelurahan dan bagaimana model politik distributif yang terjadi pada pelaksanaan di lapangan.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menulis tema tentang Politik Distributif Bantuan Langsung Tunai BBM yang mana telah ada dan mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa tinjauan terhadap hasil sejumlah penelitian yang senada dengan penelitiannya yang telah dilakukan oleh peneliti yang berbeda diperlukan untuk mendukung penguatan argumen dan analisis temuan data. Tujuan dari literaturreview yang menjadi bahan referensi penulis antara lain untuk menghindari temuan-temuan yang didiskusikan secara sama dalam skripsi, buku, dan bentuk tulisan lainnya. Penulis studi ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Jurnal Artikel yang di muat oleh tiga peneliti yakni Muhammad Ibrahim Rantau, Ahmad Murodi, Amin Fendi Rahmelan, dan Irvan Arif Kurniawan dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, dengan judul Politik Distributif Dalam Kebijakan Hibah Provinsi Banten (Studi Kasus Distribusi Dana Hibah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Di Provinsi Banten Tahun 2019) penelitian ini mengidentifikasi tentang pola distribusi politik sumber daya yang di lakukan oleh pejabat public guna untuk kepetingan pemilu yang akan datang serta basisi suara dari petahan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data primer yang didapatkan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang dibutuhkan. Narasumber yang diperoleh merupakan pihak yang memahami tentang Kebijakan Hibah Kesejahteraan Rakyat di Banten pada tahun 2019. Menurut peniliti untuk polarisasi yang terjadi di tahun 2019 tidak sama dengan tahun tahun sebelumnya yang terlihat sangat jelas tersegmentasi. Akan tetapi lebih kepada pendekatan teoripolitik bias partisipan atau bias pemilu. (Muhammad Ibrahim Rantau, 2019)

Kedua, Penelitian Jurnal Artikel yang di muat oleh Wily Haliim dengan Judul Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodama Kota Kediri penelitian ini mengidentifikasi tentang pola distribusi politik sumber daya yang di lakukan oleh pejabat public guna untuk kepetingan pemilu dan menggunakan metode studi kasus dengan Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. pembahasan

penulisan artikel ini adalah memberikan penjelasan bertahap, yaitu menjelaskan Produmas sebagai sebuah kebijakan publik dan Produmas dalam perspektif politik distributif. (Haliim, 2019)

Kesimpulan Berdasarkan perspektif politik distributif, penulis memandang produmas sebagai program politik yang disiapkan petahana untuk melawan momentum Pilkada 2018. Peralnya, setiap RT kini memiliki akses 100 juta per tahun, naik dari 50 juta. Kedua, Musrenbang harus mengecilkan partisipasi masyarakat daripada membuat program baru seperti Produmas. Ketiga, Dana Produmas biasanya tidak dapat digunakan. Indikatornya, RT tidak lagi memprioritaskan kebutuhan infrastruktur pada tahun-tahun berikutnya jika pada tahun pertama berhasil memenuhi kebutuhan infrastrukturnya..

Ketiga, Karya tulis yang dibuat oleh Binar Dwiyanto, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, dan Vivin Triyani, yang berjudul “Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa”, Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana penggunaan dana desa untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2020. Kajian ini menggunakan teknik pemeriksaan ekspresif dengan mengambil contoh wilayah 157 kota di Rezim Sumbawa, maka pada saat itu telah lengkap jumlah 157 kota yang dipisahkan menjadi empat kecamatan dilihat dari topografi wilayah setiap kota. Jumlah anggaran dana desa, jumlah relawan Covid-19, dan penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 adalah contoh sekunder adalah data yang dipakai dalam penelitian ini. (Binar Dwiyanto, 2020)

Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk memudahkan dalam menunjukkan perbandingan kondisi desa yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan penelitian, dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa diperoleh Rp148.330.675.000 dalam bentuk dana desa. untuk anggaran tahun 2020, dan dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp. Terdapat 3.634.100.177 desa dari 157 desa, dan setiap desa memiliki anggaran yang berbeda. Padat Karya Kas Desa, yang memberdayakan masyarakat untuk produktif di masa pandemi, dana desa BLT untuk masyarakat miskin desa, dan kegiatan satgas Covid-1 adalah contoh kegiatan yang menggunakan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19. (Binar Dwiyanto, 2020)

Keempat, Penelitian yang dibuat oleh Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, dan Elly Esra Kudubun, dengan judul Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19, yang dipublikasi melalui Jurnal Analisa Sosiologi 9 (2) pada bulan oktober tahun 2020. “Dalam Penelitian ini dijelaskan bantuan dana desa di Desa Jekawal Kabupaten Sragen yang digunakan untuk pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui dokumentasi lapangan, wawancara, dan observasi. Kepala desa, anggota perangkat desa, dan masyarakat desa menjadi subyek informan dalam penelitian ini. Selain itu, laporan tentang menerima bantuan dari dana desa dan kegiatan yang dilakukan dengan dana desadi Desa Jekawal berfungsi sebagai sumber untuk pengumpulan data sekunder. Studi menyimpulkan bahwa desa Jekawal menerima bantuan dana desa sebesar Rp.1.399.693,00 dan dana terkait digunakan untuk mengelola Covid-19 pandemi, yang meliputi dana desa BLT dan kegiatan gugus tugas Covid, serta untuk membangun infrastruktur desa, tahan posyandu, dan modal BUMDes. (Arima Andhika, 2020)

Kelima, Penelitian Jurnal Artikel yang dibuat oleh Ira Novianty, Iwan Setiawan, Fifi Afiyanti, Edman Syarief, Arwan Gunawan, Sudrajat, dan Djoni Djatnika, dengan judul Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat). Penelitian ini menjelaskan tentang penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19 yang mengubah prioritas anggaran menjadi kembali fokus melindungi jaringan sosial dengan stimulus ekonomi berupa BLT. metode digunakan sebagai metode penelitian. Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data. Kepala desa, perwakilan BPD, perangkat desa, dan empat kepala dusun diundang. Menurut temuan penelitian ini, belum ada sistem jaringan informasi antara pemerintah desa, daerah, dan pusat untuk mendukung jenis dan sumber bantuan yang diberikan. Akibatnya, BLT Dana Desa tidak tepat waktu disalurkan dan digabungkan dengan bantuan pemerintah lainnya. (Novianty, 2020)

Keenam, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19:” penelitian Baso Iping Tinjauan Sudut Pandang Sosial dan Ekonomi” Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak sosial ekonomi dari Covid -19 pandemi di Indonesia dan kebijakan perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui bantuan sosial BLT. Studi ini menemukan bahwa pemerintah memiliki kebijakan selama pandemi Covid-19 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha transportasi online yang paling terdampak oleh virus. Dari segi ekonomi, pemberian BLT berdampak signifikan terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat dan kemampuan kelompok pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi dampak kebijakan PHK suatu perusahaan. (Iping, 2020)

Ketujuh, Penelitian Wildan Rahmansyah tentang “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan yang muncul terkait penyaluran bansos oleh pemerintah di masa pandemi. Berdasarkan temuan kajian, terdapat beberapa permasalahan terkait kebijakan pemerintah terkait program bansos ketika ini berkaitan dengan penanganan Covid-19. Isu-isu tersebut antara lain alokasi anggaran tiap kementerian berbeda, data penerima bantuan tidak terintegrasi, dan sistem penyaluran bansos kurang efektif. Menurut temuan studi ini, penyaluran bansos memerlukan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swasta agar tepat, efektif, dan efisien. (Wildan, 2020)

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa politik distributif merupakan kebijakan yang dibentuk agar dapat mencapai tujuan politik pemilu, dalam penelitian-penelitian diatas dilaksanakan melalui kebijakan publik salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Sebagai sumber daya. Menurut peneliti perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, adalah peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pola distribusi yang difokuskan kepada peran dan fungsi yang dijalankan petugas kelurahan dan non kelurahan, dimana petugas non kelurahan mempunyai suatu peran dalam menyeleksi masyarakat yang berhak menerimamanfaat. Pada khususnya Lembaga non kelurahan seperti ibu ibu PKK.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif yang mana memiliki tiga pokok ini yakni mengambil kenyataan dalam pandangan pemahaman subjek, efek samping dari persepsi yang diperinci dan dari atas ke bawah, dan mencoba untuk menemukan hasil hipotetis baru yang jauh dari hipotesis yang ada. (Kholifah, 2018) dengan pendekatan yang berbentuk naratif.

Artinya peneliti mengumpulkan data berupa rangkaian kata dan kalimat yang membuat pernyataan dan memberikan gambaran lapangan, bukan angka atau nominal yang tetap. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan dengan langsung fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai bagaimana model penyaluran dana BLT BBM ini sampai ke masyarakat.

Dengan menggunakan metode kualitatif mendorong peneliti dapat mengidentifikasi sampai apa pola dan dinamika politik disruptif dalam penyaluran BLT-BBM kepada masyarakat. model penelitian yang di ambil pada penelitian saat ini yakni penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mengamati mendalam tentang latar belakang bagaimana kelompok, lembaga, dan individu yang berinteraksi dengan masyarakat pada saat ini. (Moleong, 2012, p. 6) berpendapat yakni *field research* dapat dipandang menjadi teknik ekspansif untuk inkuiri subyektif ataupun strategi penghimpunan data subyektif. Karakter kualitatif data sangat berguna. Untuk mengamati kondisi atau fenomena alam secara “in-situ”, peneliti akan mendatangi lokasi. Untuk situasi ini, strategi ini terkait erat dengan persepsi partisipatif. Ilmuwan lapangan biasanya mengambil banyak catatan lapangan, dan setelah itu membuat kode dan membedahnya dengan cara yang berbeda.

Strategi penulis didasarkan pada studi kasus. Tujuan dari studi studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran temuan serta pengertian yang menyeluruh terkait bagaimana kondisi atau situasi yang memerlukan investigasi, khususnya gambaran bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan. Menurut

Yin Zai dalam (Walhyuningsih, 2013), Metode studi kasus yang dikenal sebagai megidentifikasi empiris menganalisis fenomena dalam konteks dunia fakta, membuat superposisi antara fenomena dan keadaan tidak jelas. Selain itu, ia menyatakan bahwa studi kasus dapat digunakan untuk melakukan penelitian di bidang-bidang seperti administrasi publik, kebijakan publik, ilmu manajemen, perencanaan pendidikan, dan perencanaan wilayah. Berkat studi kasus, peneliti dapat mempertahankan sifat umum dan penting dari peristiwa aktual. Studi kasus memiliki keuntungan khusus karena berkorelasi penuh dengan berbagai jenis bukti, seperti dokumen, instrumen, wawancara, dan observasi.

Studi kasus sangat membantu pada individu atau ilmuwan perlu memperoleh pemahaman terkait pemasalahan dan keadaan khusus sehingga bisa membedakan kasus yang mencerahkan. Tujuan khas studi kasus adalah untuk mendeskripsikan jenis kelompok atau individu "unik" terkait suatu masalah. Seseorang bisa menjadi kasus. peristiwa kunci, prosedur, atau komunitas, berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, latar belakang, dan keseluruhan unit. Akibatnya, studi kasus cenderung akan sesuai apabila digunakan untuk memahami bagaimana atau mengapa. tidak dicirikan dengan jelas, dan banyak sumber bukti. Ia juga mengatakan penelitian di dalam segi seperti perencanaan wilayah, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu manajemen, dan perencanaan pendidikan dapat menggunakan metode studi kasus. Investigasi kontekstual memiliki potensi kepada ilmuwan guna memegang kualitas umum secara signifikan. Studi kasus memiliki keunggulan unik karena berkorelasi penuh terhadap bermacam model bukti, seperti instrumen, wawancara, dokumen dan observasi.

Studi kasus juga diperlukan ketika seseorang atau penelitian ingin mempelajari permasalahan atau kondisi khusus dan menemukan peristiwa baru. Perbedaan individu atau perubahan "unik" yang terjadi dalam suatu masalah biasanya adalah tujuan studi kasus. Kasus dapat berupa seseorang. peristiwa penting, prosedur, peristiwa, atau entitas yang mencoba menggambarkan entitas secara menyeluruh, mendalam, dan detail. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa studi kasus biasanya merupakan cara yang lebih baik untuk mempelajari bagaimana atau mengapa.

2. Sumber Data

(Sugiyono, 2014, p. 157) Mengatakan sumber data adalah sesuatu yang tertulis, baik fisik maupun non fisik, dari mana data berasal. Sumber data sentral atau utama disebut sebagai sumber data primer. Tipe data yang dihasilkan adalah data primer. Sumber data tambahan sering disebut sebagai sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data atau informan yaitu Kemensos Kota Semarang, Satpam Ngaliyani, aparat Desa Wates dan relawan yang mengoperasikan program BLT-BBM, penerima manfaat program BLT-BBM dan di lapangan. Catatan tentang masalah yang diselidiki. Penelitian ini mengkaji informan kunci isu yang menguasai isu, memiliki data dan bersedia memberikan data.

b. Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi dimana dikumpulkan dengan cara selain subjek penelitian. Data untuk pengumpul data yang didapatkan dari data sekunder dengan tidak langsung. Dalam penelitian, data primer didukung oleh sumber data seperti buku, resensi, literatur, dokumentasi, penelitian, dan sumber terkait Program lainnya. Penyelauran BLT BBM Kelurahan Wates.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang baik, benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis memulai wawancara dengan sesi tanya jawab dengan pihak terkait langsung. Lurah, Sekretaris, PSM, Kasi Kesos, RT, IT, Warga.

2. Observasi

Salah satu cara untuk memantau secara langsung atau tidak langsung peristiwa yang sedang berlangsung adalah observasi. Pengamatan adalah metode yang sangat sederhana yang tidak memerlukan keahlian khusus. Metode observasi partisipatif atau observasi partisipatif digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program BLT-BBM di salah satu kegiatan perlindungan sosial. Pengamatan ini dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dan mengamati realitas kehidupan mereka secara normal, natural dan rutin (Mulyana, 2002, p. 200). Sebagai peserta langsung program BLT-BBM di Desa Wates lokasi penelitian, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan.

3. Dokumentasi

Pengabdian atau Dokumentasi adalah proses penghimpunan informasi berbentuk tulisan dimana bisa didapatkan, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai alat bukti resmi. Mengingat tiga macam sumber komposisi (kertas), tempat (*place*), dan Individu objek perolehan data adalah dokumentasi sebagai kumpulan informasi sebagai catatan. Sebagai pendukung, foto, video, dan sumber internet digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi tertulis atau lainnya terkait pelaksanaan BLT BBM di Desa Wates.

H. Analisis data

Analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2009:339), adalah teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk mengatur data yang mereka kumpulkan agar mereka dapat membuat kesimpulan tentang penelitian mereka. Karena data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat diterima begitu saja, analisis data merupakan komponen penting dari metode ilmiah karena membuat data lebih relevan dan bermakna. Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Pengurangan atau reduksi data adalah suatu proses peningkatan informasi, khususnya informasi yang diperoleh dari lapangan diisi dengan jenis laporan yang kemudian diringkas, diringkas, dipusatkan pada hal-hal yang penting. Mencari tema dan pola yang tersusun secara logis. Semakin sedikit data memberikan gambaran yang jelas hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengakses data saat dibutuhkan

2. Penyajian Data

Penyajian materi dilakukan guna mendapatkan gambaran umum atau bagian-bagian tertentu dari penelitian melalui uraian deskriptif tentang masalah yang dipelajari.

3. Verifikasi

Langkah ketiga adalah penyelesaian atau verifikasi analisis data kualitatif. Jika, di kemudian hari, tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung materi tersebut, kesimpulan awal berubah. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulannya dianggap kredibel bila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Tata cara pengumpulan, pemasukan, analisis data, penarikan dan pengujian kesimpulan, serta penulisan hasil dalam bentuk naratif pada dasarnya sama untuk semua teknik data kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Suatu cara untuk menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data dan bahan yang tersusun menjadi suatu komposisi penelitian dikenal dengan sistematika penulisan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu awal, inti, dan kesimpulan. maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pembahasan bab Kedua berisi mekanisme di lapangan terkait penyaluran Program BLT BBM Sub bab terdiri dari aparat pelaksana dan proses singkat pelaksanaan Bantuan Program BLT BBM.

Pembahasan bab Ketiga meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan Gambaran Umum objek penelitian, data penelitian, dan teknik menganalisis.

Pada Bab Keempat berisi Permasalahan Politik distributif yang terjadi BLT di Kelurahan Wates dan Kec Ngaliyan dan Politik distributive yang terjadi dalam BLT BBM di Kec Ngaliyan dan Kelurahan Wates, Serta menyampaikan data data yang sudah terkumpulkan

Bab Kelima sebagai bab Identifikasi Pola dan Dinamika Politik Distributif yang terjadi di lapangan serta mendeskripsikan hasil temuan peneliti.

Bab Enam sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni identifikasi terkait terjadi politik distributif.

Daftar pustaka memuat sumber referensi atau sumber yang dipakai dalam pengerjaan penelitian. Daftar pustaka yang disusun hanya memuat sumber referensi. Lampiran berisi informasi yang didapat selama penelitian yang berguna dan mendorong laporan penelitian, tetapi tidak dapat disajikan dalam batang tubuh penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Politik Distributif

Proses pendistribusian sumber daya dalam politik tidak dapat dipisahkan. Memahami bahwa politik adalah arena alokasi dan distribusi sumber daya, dikenal sebagai politik distributif. Aset dicirikan sebagai, apapun yang dapat melibatkan atau memberdayakan warga dalam hubungan kekuasaan mereka dengan pertemuan yang berbeda (anggota parlemen, otoritas publik). Secara empiris, istilah "sumber daya" mengacu pada barang sosial dan material. (Stokes S. e., 2013, p. 3)

Distribusi sumber daya pada politik yakni tidak dapat dipisahkan kepentingannya dari politik kepentingan pemilu yang dimaksud untuk mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan dukungan, berupa suara pada pemilihan umum dalam hal ini, apabila para pemegang kekuasaan politik berkonsentrasi pada kemenangan pemilu, maka distribusi sumber daya tersebut dapat cenderung tertuju pada bermacam tindakan atau strategi untuk memenangkan pemilihan umum. Salah satu pelaksanaan politik distributif berkaitan dengan pemanfaatan program-program negara atau program pemerintah untuk meraih kemenangan pada pemilu. (Stokes S. e., 2013, p. 6)

Dengan demikian pernyataan stokes di atas dapat di ambil pendapat bahwa , Dalam hal ini, politik distributif kemungkinan akan menguntungkan pemerintah. Hal ini disebabkan kemungkinan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pemerintah yakni Penguasa akan lebih berperan langsung dalam memaksimalkan manfaat program pemerintah. Berikutnya adalah penggambaran peredaran aset yang diselesaikan oleh otoritas publik (Wardani S. B., 2014, p. 7)

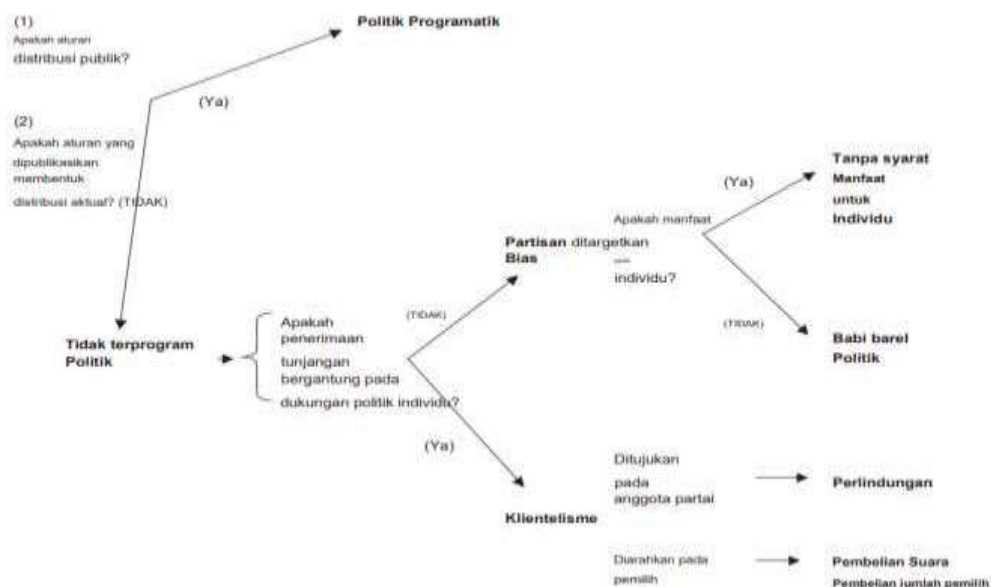
Gambar 2.1



Sumber: Buku Panduan Pendidikan Pemilih tentang Transaksi Politik dalam Pemilu, 2014

Dalam rangkaian pelaksanaan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh negara, Konsepsi politik distributif selanjutnya juga dimaknai sebagai strategi mengikut sertakan partisipasi penduduk (Stokes S. e., 2013, p. 6). Dalam pelaksanaannya, politik distributif selanjutnya dibagi menjadi dua kategori yaitu Pertama, distribusi sumber daya yang terprogram (*programmatic*), kedua yang tidak terprogram (*non programmatic*) (Stokes S. e., 2013, p. 7) Dalam politik distributif terprogram, distribusi sumber daya dilaksanakan dengan tidak secara langsung untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, akan tetapi dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara tidak langsung atau melalui perantara, sehingga alokasi sumber daya negara sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.2



Sumber : Buku Politics Distributive Susan C Stokes

Penyelenggaraan kegiatan musrenbang yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aspirasi bersama dalam perencanaan pembangunan dapat digolongkan dalam bentuk programatik sebagai kebijakan distributif. kemudian pembagian sumber daya non-program dibagi menjadi dua bagian, yaitu bias dan orientasi pelanggan (*customer policy/machine policy*). Basis klien adalah rencana distribusi yang dilaksanakan oleh aktor politik, baik individu maupun partai, yang memberikan keuntungan material bagi pemilih dan tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik pemilih. Dalam event politik yang akan dilaksanakan, Keuntungan material ini hanya diberikan jika pemilih sanggup memberikan suaranya. Yang termasuk dalam klientilisme adalah *patronase*, jual beli suara (*vote buying*), serta *constituency services*. Klientilisme dapat dilakukan oleh setiap peserta politik, baik non petahana maupun peserta petahana atau yang mempunyai akses kepada pemilik kekuasaan distribusi sumber daya negara. (Stokes S. e., 2013, p. 13)

Selain itu, klasifikasi keberpihakan partai politik terbagi menjadi dua jenis: pertama, kebijakan atau program dimana berpihak pada kepentingan elektoral/politik (orientasi elektoral program publik) dan politik pork barrel. Program bias kepentingan elektoral adalah alokasi dan alokasi sumber daya kepada individu atau kelompok orang untuk mempengaruhi keputusan politik individu atau kelompok orang untuk memilih partai atau pemilih yang menyediakan sumber daya tersebut. Dalam model politik desentralisasi, kepentingan elektoral tidak melibatkan sanksi terhadap individu yang menerima sumber daya, sekalipun individu tersebut menyerahkan hak pilihnya kepada partai atau aktor politik lain. (Stokes S. e., 2013, p. 12)

Oleh karena itu, penerapan politik distributif secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori terprogram juga dikenal sebagai terprogram (*Programatic*) dan (*non-programmatic*) atau tidak terprogram.

1. Politik Distribusi Programatis

Ada peran perantara dalam politik distributif programatis yang tidak melibatkan mobilisasi pilihan politik warga untuk kepentingan kandidat, atau berfungsi sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan pemilih dan kandidat. Orang tengah berperan sebagai pengumpul data dan keinginan

penghuni sehubungan dengan masalah dan kebutuhan yang dilihat oleh penghuni. Nantinya, informasi dan tujuan yang terkumpul akan digunakan sebagai tuntutan untuk menyelesaikan masalah. (Saragintan, 2016, p. 8)

Dalam politik distributif yang programatik, paling tidak ada dua kriteria yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Kriteria dari pendistribusiannya harus bersifat publik.

Meskipun tidak selalu, perumusan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan politik distribusi biasanya didahului oleh diskusi publik. Kedua, standar formal distribusi harus benar-benar mengarahkan distribusi sumber daya yang bersangkutan langsung kepada masyarakat dan bermanfaat untuk warga. (Stokes S. e., 2013, p. 6) Agar Strategi distributif bersifat terprogram, dalam penggunaan kita, ada dua hal yang harus benar. Pertama, kriteria distribusi harus bersifat publik. Seringkali, meski tidak selalu, diskusi publik mendahului pembuatan kebijakan distributif dan implementasinya. Kebijakan yang ada merupakan produk dari diskusi internal pemerintah atau proses birokrasi, kriteria distribusi tersedia untuk diskusi publik. Pertama diformalkan dan bersifat publik, dan Kedua Membentuk distribusi manfaat atau sumber daya yang sebenarnya.

Pada politik distributif programatis, memiliki dua tipe yang penting untuk difokuskan (Stokes S. e., 2013, p. 6) Pertama dan terpenting, standar distribusinya harus tersedia untuk umum. Membuat kebijakan dan peraturan tentang politik distribusi biasanya didahului oleh diskusi publik, meskipun tidak selalu. Kedua, standar formal distribusi harus benar-benar memastikan bahwa sumber daya yang bersangkutan langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan cara yang bermanfaat. Sementara politik distributif nonprogramatis terbagi menjadi dua jenis: klientilisme dan bias partisan.

Klientelisme adalah distribusi atau penyebaran politik ketika anggota atau partai politik memberikan keuntungan material kepada pemilih, dengan syarat warga harus memutuskan untuk sanggup mendukung peserta politik atau partai tersebut. Pemilih yang tidak memilih kontestan politik tersebut tidak akan mendapatkan material atau balasan dari kontestan politik. (Wardani, 2014, p. 24)

2. Distribusi Non Programatic

Dalam Politik Distributif Non Pragramatis di bagi menjadi 2 bagian yakni :

a. Klientilisme

Klientilisme adalah metode distribusi di mana kontestan atau partai politik memberikan keuntungan signifikan kepada pemilih dengan syarat pemilih memberikan suara mereka. Pemilih yang tidak memberikan suara mereka tidak akan menerima keuntungan signifikan dari kontestan atau partai politik tersebut. (Wardani, 2014, p. 25) Ada beberapa kategori yang termasuk dalam praktik klientilisme, yaitu *patronase*, jual beli suara, dan *constituency service*. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa *patronase* pemberian hadiah kepada kelompok atau individu atas dasar dukungan mereka terhadap partai politik yang memerintah. Dan telah memiliki hubungan sebelumnya. Sedangkan *constituency service* mempunyai alokasi sumber daya yang berawal dari anggaran negara, akan tetapi diserahkan dengan sifat pribadi, personal, individu dan tersegmentasi (Saragintan, 2016, p. 22)

b. Bias Partisan

Strategi distribusi bias partisan dibagi menjadi dua, yaitu program atau kebijakan publik yang bias kepentingan pemilu (*electoral diversion of public programs*) dan kebijakan politik pork barrel.

1) Bias kepentingan pemilu (electoral diversion of public programs)

Bias Kepentingan pemilu berada pada Pemahaman bahwa, distribusi sumber daya di antara anggota masyarakat dapat meningkatkan dukungan seseorang terhadap partai atau kandidat, yang menyalurkan sumber daya terkait dengan bias kepentingan pemilu. Individu atau kelompok yang telah menerima sumber daya tersebut tetapi memilih partai atau kandidat lain tidak dikenakan sanksi. Dengan kata lain, dengan melakukan ini, sama sekali tidak ada keterikatan atau timbal balik kepada kandidat. (Palenewen, 2014)

2) Kebijakan Politik Pork Barrel

Sebaliknya, pork barrel merupakan upaya politik distributif yang dilakukan di lokasi-lokasi yang terkait dengan politisi, seperti berbasis daerah pemilihan (Dapil) atau wilayah geografis tertentu. Pada awalnya, tong babi dijelaskan sebagai hasil dari upaya individu politisi untuk mengontrol bagaimana suara didistribusikan dalam pemilihan lokal. (Denemark, 2000) Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa orang yang dirujuk adalah orang-orang dari parlemen, khususnya orang-orang dari Kongres AS yang sering dipandang sebagai studi yang luar biasa bagi negara tersebut. Politik pork barrel dianggap tidak etis karena memberi satu wilayah keuntungan, yang mana itu tidak adil dalam distribusi sumber daya. Sementara itu, awal mula aset tersebut menjadi tanggungan seluruh daerah. Selain itu, mereka memasukkan program pemerintah yang membantu mereka lebih dekat dengan konstituen, dan mereka menjadikan program tersebut dalam bagian kampanye mereka, agar terpilih kembali. (Walker, 2010, pp. 5-7)

Seperti disebutkan sebelumnya, John Farejohn awalnya menciptakan istilah "tong babi" untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi selama Kongres Amerika. Sejak awal, masalah legislatif barel babi dipandang elit di AS. Karena politik pork barrel dipandang sebagai upaya legislator untuk mendapatkan alokasi dana untuk dibawa ke konstituen di daerahnya, dengan maksud memberikan insentif kepada konstituen untuk memilih kembali caleg pada periode berikutnya, penelitian tentang politik pork barrel memberikan banyak contoh kasus yang berasal dari anggota legislatif. Namun seiring perkembangannya, fenomena ini semakin meluas dan semakin dikenal karena dapat juga dikenakan pada para eksekutif, dan terjadi di berbagai negara dengan manifestasi dan karakteristik yang berbeda-beda. (Scholl, 1985)

Menurut Analisis (Saragintan, 2016, pp. 12-13) Ada lima ciri mendasar yang dapat digunakan untuk menggeneralisasi fenomena politik pork barrel dalam kajian politik distributif. Pertama-tama, meskipun pada awalnya gagasan ini difokuskan pada cara berperilaku pembuat undang-undang atau pejabat legislatif, hal semacam itu dapat dilakukan oleh seorang pimpinan pemerintahan dan terutama dikaitkan kepada mereka yang akan menghadapi pemilihan umum di wilayahnya agar terpilih kembali. Kedua, masalah legislasi Politik diselesaikan dengan menggunakan rencana keuangan negara. Setiap investigasi kontekstual yang diangkat pada umumnya menggambarkan prakarsa yang didukung pembayar pajak dan pembagian aset dari tengah hingga ke daerah. Dana yang telah dialokasikan digunakan untuk mendongkrak elektabilitas caleg tertentu. Ketiga, politik pork barrel memiliki konteks kedaerahan atau kelompok. Artinya, porsi harta hanya untuk membantu perkumpulan yang berada di lingkungan teritorial tertentu. Kemungkinan lain adalah area dimana suara itu berada atau area dimana suara itu diarahkan adalah targetnya.

Hal ini pula yang berkaitan dengan ciri-ciri politik pork barrel yang keempat, yaitu bersifat diskriminatif. Tentu saja, hanya beberapa orang terpilih yang dapat memperoleh manfaat dari hasil alokasi dana tersebut, karena bersifat teritorial atau berada dalam konteks wilayah tertentu. Akibatnya, politik pork barrel seringkali mendiskriminasi kelompok atau individu tertentu. Kelima, karena belum tercapai kesepakatan, politik pork barrel tidak mewajibkan konstituennya untuk memilih incumbent. Selain sifat penerima, inilah yang membedakan patronase dari politik pork barrel. Jika konstituen sudah memilih petahana, distribusi sumber daya akan dilakukan karena patronase juga mengikat. Namun, karena distribusi sumber daya biasanya dilakukan selama periode pra-pemilihan dalam politik pork barrel itu tidak mewajibkan konstituen untuk memilih petahana. (Saragintan, 2016, pp. 12-13)

Arti istilah Politik Pork Barrel telah berubah, dan sekarang pemimpin eksekutif dapat membuat kebijakan daerah untuk kelompok tertentu daripada hanya kebijakan nasional. Definisi ini tentu memiliki kekurangan,

karena konsep kelompok berbeda dengan konsep awal yang digunakan oleh (Drazen, 2006) (Saragintan, 2016, hlm. 12-13). Oleh karena itu, berarti pemilih yang menjadi anggota. Kelompok pekerjaan atau kelas terkait seperti pekerja pabrik, petani atau kelas menengah disebut "geng". Bahkan, masyarakat di negara berkembang dan daerah tertentu harus bersaing dengan kelompok warisan masa lalu.

Dalam istilah klientelisme atau patronase, kemunculan mereka memicu hubungan klien lama, atau seperti yang dikatakan James Scott, hubungan klien lama yang bertahan dalam masyarakat postmodern baru, atau disebut hubungan klien baru (Stokes S.e., 2013, p. 13) Tidaklah berlebihan jika terjadi ganjalan antara konsep pig barrel dan customer focus, karena keduanya ada dalam masyarakat yang masih mempertahankan struktur faksi masyarakat lama. Kelompok sasaran adalah individu

Hal ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dirancang sesuai dengan keinginan pemimpin petahana dan melayani kepentingan semua warga bukan hanya segelintir orang. Kedua, karakter lain yang menjadikan fokus adalah model kebijakan yang berbasiskan pada wilayah tertentu.

B. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak

Pengertian BLT adalah skema kompensasi jangka pendek yang dicanangkan pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat miskin, terutama rumah tangga yang dianggap miskin karena kenaikan harga barang dan makanan, dalam kondisi tertentu.(Tangkilan, 2003). BLT BBM merupakan program kompensasi jangka pendek pada tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. Dan rumah tangga tersebut sangat miskin, miskin dan hampir miskin (hampir miskin). Meskipun program BLT bukan merupakan program yang puas dengan penyelesaian masalah kemiskinan, namun diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan jika biaya kebutuhan hidup masyarakat meningkat menjadi keseimbangan baru. (Tangkilisan, 2003)

Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) adalah bantuan keuangan bansos dari dana pemerintah pusat bagi keluarga miskin untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bantuan ini disediakan pemerintah untuk meredam dampak inflasi dan kenaikan harga BBM nasional. Setiap keluarga yang kurang mampu mendapatkan BLT BBM. Pada tahun 2020, BLT BBM segera diserahkan menjadi 2 tahapan yakni, tiap tiap orang Rp300.000. Bulan September menandai dimulainya penyaluran, yang akan berlanjut hingga November 2022. BLT BBM diharapkan bagi keluarga yang kurang mampu dengan memberikan uang yang diperoleh dari Pemerintah Pusat untuk sedikit mengurangi efek finansial karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Sehingga masyarakat dapat merasakan perhatian dari pemerintah terkait BLT BBM ini karna dianggap subsidi BBM kurang tepat bagi masyarakat kelas bawah. (Kompas.tv, 2022)

C. Sejarah Bantuan Langsung Tunai

Sejarah singkat awal mula program BLT dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan. Di negara berkembang, kemiskinan sebagai masalah sosial masih belum terselesaikan. Kemiskinan nyata dalam struktur dan kondisi kehidupan manusia yang sangat terganggu karena kemiskinan tidak dapat dengan mudah dihilangkan. masalah negara berkembang, terutama kemiskinan.

Pemerintah kemudian mengembangkan program atau kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Termasuk di dalamnya adalah Bantuan Langsung Tunai atau yang biasa dikenal dengan BLT. BLT didirikan oleh Brasil pada 1990-an sebagai Bolsa Escola dan kemudian berganti nama menjadi Bolsa Familia, didirikan oleh Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden ke-35 Brasil.

D. Sejarah Bantuan Langsung Tunai di Indonesia

BLT BBM hadir di Indonesia tanpa presiden untuk tahun 2004. Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi minyak di saat harga minyak dunia sedang naik. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa pekerja industri dan orang kaya lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi. Pengumpulan data selanjutnya mengungkapkan bahwa 75% BBM bersubsidi digunakan antara tahun 1998 dan 2005. Karena kenaikan harga minyak dunia pada tahun tersebut, pengurangan subsidi berlanjut hingga tahun 2008, yang mengakibatkan kenaikan 50% dari harga awal. Akibatnya harga kebutuhan pokok juga naik. Pada tahun 2005,

pemerintah pertama kali memperkenalkan program BLT kepada masyarakat dalam upaya memitigasi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat miskin. (Selviana, 2016)

Kebijakan semacam ini dimulai Jusuf Kalla, segera setelah ia dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 di Indonesia. Terakhir, berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2005, Program Bantuan Langsung Tunai Tanpa Syarat diperpanjang dari Oktober 2005 hingga Desember 2006. Sasarannya adalah 19,2 juta keluarga miskin. Kemudian, ketika harga minyak dunia kembali naik, pemerintah kembali mengaktifkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008, seperti pada 2005. (Kompas.com)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu dari banyak kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimulai dengan Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang "Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin" dan Inpres No. 3 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang "Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran". Kebijakan program ini bertujuan untuk menangani kemiskinan di Indonesia, yang merupakan sumber semua perubahan di seluruh negara dan dunia. Analisis deskriptif, pelaksanaan yang sistematis, dan peraturan perundang-undangan deskriptif kondisional dan fungsional melengkapi program BLT sebagai program dan kebijakan nasional. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. dari kebijakan kenaikan harga BBM, kebijakan BLT pemerintah menuai banyak protes dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat. pemimpin regional dan nasional Pada tahun 2005, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 126 persen

Dalam situasi ini, negara harus menerapkan strategi bantuan langsung melalui BLT. Namun, kebijakan bantuan keuangan langsung (BLT) yang ditujukan kepada rumah tangga miskin untuk mengkompensasi pemotongan subsidi BBM menimbulkan perselisihan dan masalah baru. Kebijakan BLT terkesan terburu-buru dan dipaksakan karena waktu pemberian payung hukum dan waktu pelaksanaannya

yang singkat. Tak mengherankan, banyak masalah muncul kemudian, seperti ketidaksepakatan antara berbagai pihak. Institusi pemerintah, media, dan masyarakat umum Penggunaan beberapa istilah, seperti PKPS (Program Kompensasi Subsidi), Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak (DKM), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), menunjukkan hal ini.

Ini menunjukkan betapa kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap program ini. Kebijakan tidak selalu berjalan lancar; ada kendala. Salah satu contohnya adalah ketika Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan di Desa Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagian orang miskin tidak dapat terdaftar sebagai penerima manfaat karena mereka tidak mampu membayar. tetapi faktanya adalah orang-orang yang mampu, atau kepala keluarganya, memiliki penghasilan tetap setiap bulan saat mereka menerima tunjangan tersebut. (Selviana, 2016)

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. KOTA SEMARANG

Semarang adalah ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang lahir pada tanggal 2 Mei 1547. Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi di Jawa Tengah, mempunyai luas daerah sebesar 373,70 km² yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Demak di bagian timur dan Laut Jawa di bagian utara dengan garis pantai kurang lebih 13,6 km.

Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. mempunyai misi dan visi yang tertera pada RPJM Kota Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut (semarangkota.go.id, 2022):

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal dalam pelayanan
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dengan letak geografis di antara 60° 50' - 70° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Timur : Kabupaten Demak
- d. Barat : Kabupaten Kendal

Dilihat dari segi Topografinya terdapat pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang membatasi langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran

rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 - 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 - 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%).

Iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki dua musim—musim kemarau dari April hingga September dan musim hujan dari Oktober hingga Maret—berbeda-beda tergantung di mana Anda tinggal. Dalalh Daltalrah Tinggi terletak di sebelah Selaltaln, dan Altalu, juga dikenal sebagai Semalralng Altals, memiliki ketinggian 90-359 meter di ketinggian permukaan laut. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 2.790 milimeter, dan suhu udara berkisar antara 230 derajat Celcius hingga 340 derajat Celcius. Kelembaban tahunan rata-rata adalah 77%.

Wilayah dataran rendah Kota Semarang atau yangbiasa dikenal dengan sebutan Semarang Bawah memiliki ketinggian antara 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan pondasi pembangunan di Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat yaitu jalur kereta api dan jalan raya, dan juga jalur transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan pintu gerbang bagi Provinsi Jawa Tengah. (semarangkota.go.id, 2022)

2. Kondisi Demografi Kota Semarang

Demografi sendiri merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, sebuah wilayah dan juga kondisi suatu wilayah dalam hal ini adalah kondisi demografi yang ada di kota semarang yang memiliki wilayah yang luas. (semarangkota.go.id, 2022)

Tabel 3. 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Mijen	57,55
2	GunungPati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	GajahMungkur	9,07
5.	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,79
16	Ngaliyan	37,99
	Jumlah	373,7

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Berdasarkan Tabel di atas Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan dua wilayah kecamatan terluas terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat potensi perkebunan dan pertanian, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km².

Sementara wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayahnya seluas 6,14 km². Kedua Kecamatan dengan wilayah terkecil ini adalah daerah pusat kota yang sekaligus menjadi sebagai pusat bisnis atau perekonomian di Kota Semarang sehingga sebagian besar wilayahnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah, seperti Kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang biasa dikenal dengan sebutan Kota Lama Semarang.

3. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang

Kota Semarang memiliki populasi yang sangat heterogen yang terdiri dari kombinasi beberapa identitas, Jawa, Tionghoa, Badui dan kerabat. Suku bangsa lain dari berbagai penjuru Indonesia juga datang ke Semarang untuk mencoba, belajar, atau menetap selamanya. Mengingat kota Semarang merupakan rumah bagi banyak universitas, sekolah, dan perguruan tinggi ternama. Sebagian besar penduduk kota Semarang menganut agama Islam, begitu juga dengan pemeluk agama lain yang cukup banyak seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Jadi, masyarakat Kota Semarang sangat berbeda satu sama lain, namun kehidupan sosialnya sangat damai. Praktik keagamaan sangat ditoleransi. Karena itu, Semarang adalah tempat yang tepat di Indonesia untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis karena kondisi keamanannya yang kuat. Keanekaragaman suku di Kota Semarang juga menjadi landasan slogan dalam Penanda Kota Semarang, yaitu "Ragam Budaya". "Ragam Budaya" mengacu pada pengembangan dan estetika Kota Semarang dengan tetap melestarikan budayanya yang beragam. Pesannya, kota Semarang niscaya akan dipengaruhi oleh perpaduan berbagai budaya Jawa dengan budaya Cina, Arab, dan Belanda. Aset

utama yang harus ditonjolkan di Kota Semarang adalah keragaman budayanya karena dari segi pariwisata merupakan daya tarik yang menjadi daya tarik wisatawan ke kota tersebut.

Dampak dari keragaman budaya ini mengakibatkan banyak varian dalam berbagai hal. Misalnya, dari perspektif acara yang melibatkan masakan, agama, bangunan dan arsitektur warisan, seni, dan mata pelajaran lainnya. Dari berbagai ragam yang dirasakan di kota Semarang, cenderung terlihat bahwa cara hidup di kota Semarang menggabungkan budaya Jawa, pesisir, Arab, dan Tionghoa.

Mengenai masalah sosial budaya, Kodiran dalam (Koentjaraningrat., 2000, p. 322) dikutip oleh masyarakat kota Semarang menyebutkan bahwa, budaya Jawa tersebar di seluruh pulau Jawa hingga ke timur. Selain itu, disampaikan bahwa daerah selain Semarang disebut secara kolektif sebagai daerah Kejawen. Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri adalah beberapa tempat tersebut. Di luar, daerah ini dikenal sebagai ujung timur dan daerah pesisir. Karena Kota Semarang berada di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, maka termasuk dalam budaya pesisir Jawa berdasarkan gambaran budaya yang tumbuh dan berkembang oleh penduduknya.

Penduduk Kota Semarang, seperti Yogyakarta dan Surakarta, berkomunikasi dalam bahasa Jawa dengan logat yang hampir sama dengan bahasa Jawa pada umumnya. Bahasa Jawa yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat di Jawa Tengah, mengingat kota Semarang, dan yang menjunjung tinggi kehidupan masyarakat Jawa, dimulai dari bahasa Jawa Kuno. Ngoko, tengah, dan krama adalah tiga tingkatan bahasa Jawa yang digunakan dalam komunikasi lisan dan tulisan sehari-hari. Ada tiga tingkatan ngoko pertama ngoko biasa, kedua ngoko menengah, dan ngoko andap.

Selain itu, madya juga memahami tiga tingkatan pokok sedang, ngoko madya, krama madya. berkaitan dengan sistem kekerabatan, atau jaringan hubungan antar individu yang satu sama lain masih ada hubungan darah atau keturunan. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, masyarakat Jawa di kota Semarang pada umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral. Prinsip bilateralisme adalah memperhatikan keanggotaan kelompok kekerabatan laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Mengutip dari (Koentjaraningrat., 2000, p. 130) ,

dalam sistem kekerabatan kesatuan individu terikat oleh unsur-unsur antara lain:

- a. suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok,
- b. suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh semuaarganya,
- c. suatu sistem hak kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok,
- d. suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok,
- e. suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individu terhadap sejumlah harta produksi dan harta konsumtif.

Adapun istilah yang digunakan untuk menyebut dan atau menyapa kerabatnya pada dasarnya tidak jauh berbeda seperti istilah yang digunakan oleh orang Jawa di Jogjakarta dan Surakarta.

Tabel 3. 2

Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang tahun 2020

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Mijen	72.333	10. 009	7. 248	64	3.332	56
2	Gunungpati	92.947	11.017	6.862	44	1.701	32
3	Banyumanik	122.294	11.069	6.761	184	1.730	67
4	Gajah Mungkur	49.914	4.247	2.427	53	253	19
5	Semarang Selatan	57.007	3.042	1.537	41	119	19
6	Candisari	68.249	16.642	10.621	84	975	27
7	Tembalang	166.567	5.423	5.223	238	297	19
8	Pedurungan	167.167	5.005	5.986	136	234	30
9	Genuk	114.973	4.426	4.461	20	284	26
10	Gayamsari	66.591	10.398	7.329	14	257	16
11	Semarang Timur	52.634	9.472	9.977	8	347	23
12	Semarang Utara	104.653	1.865	1.309	31	96	24
13	Semarang Tengah	40.331	14.738	10.246	34	1.054	19
14	Semarang Barat	131.211	2.904	1.425	152	55	27
15	Tugu	33.026	5.932	4.370	8	106	8
16	Ngaliyan	130. 545	555	384	125	54	15
Jumlah		1. 470. 442	116. 744	86. 166	1. 236	10. 894	427

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Jika dilihat walaupun masyarakat Kota Semarang sangatlah beragam, akan tetapi kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat harmonis. Dalam kehidupan beragama toleransi sangatlah di junjung tinggi. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dan yang menjadikan kondisi ketertiban dan keamanan kota Semarang sehingga kota ini menjadi salah satu kota Indonesia yang amat bagus untuk berkembangnya bisnis dan investasi. tagline dalam City Branding Kota Semarang yaitu "*Variety of Culture*". "*Variety of Culture*" menjadi latar belakang Keragaman etnis yang ada di Kota Semarang juga bermakna bahwa Kota Semarang memperindah kota dengan selalu konsisten menjaga budaya yang berbagai macam. Kesan dan pesan tersurat dan tersirat yang disampaikan bahwa harmonisasi bermacam budaya asli Jawa dengan kebudayaan, Arab, china dan Belanda tentu disadari di Kota Semarang.

Semarang kota mempunyai keragaman adat dan budaya yang mana adalah instrumen pokok yang mesti di tampilkan, karena dari kaca mata wisata hal itu adalah daya tarik agar wisatawan tertarik bertamu ke Kota Semarang. Efek dari keragaman adat dan budaya ini menimbulkan banyak model ragam dalam alterasi banyak hal. contohnya dipandang dari pojok peninggalan bangunan/arsitektur, religi, kuliner dan event kesenian, dan lainnya. Dari ragam alterasi yang ada di Kota Semarang tersebut bisa dilihat bahwa budaya yang ada di Kota Semarang antara lain budaya Jawa, Arab, China dan Pesisir.

Pemberdayaan adat dan budaya di Kota Semarang diutamakan untuk kelestarian, pembinaan, pengembangan, budaya lokal untuk budaya persatuan nasional. Elemen elemen masyarakat seni budaya, budaya tradisional agar terus didukung dan disuport semangatnya untuk menekuni seni yang tekuninya, dengan memunculkan pengembangan kreativitas dalam hal memenuhi harapan masyarakat yang luas akan pembaharuan. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah menyediakan sebuah tempat, yakni Taman Raden Saleh Kota Semarang, yang mana di lokasi tersebut terdapat bermacam kemudahan, seperti panggung tertutup, sanggar terbuka dan lainnya, sehingga harapannya di sektor budaya bisa menjadi pendongrak ekonomi daerah terutama kota Semarang.

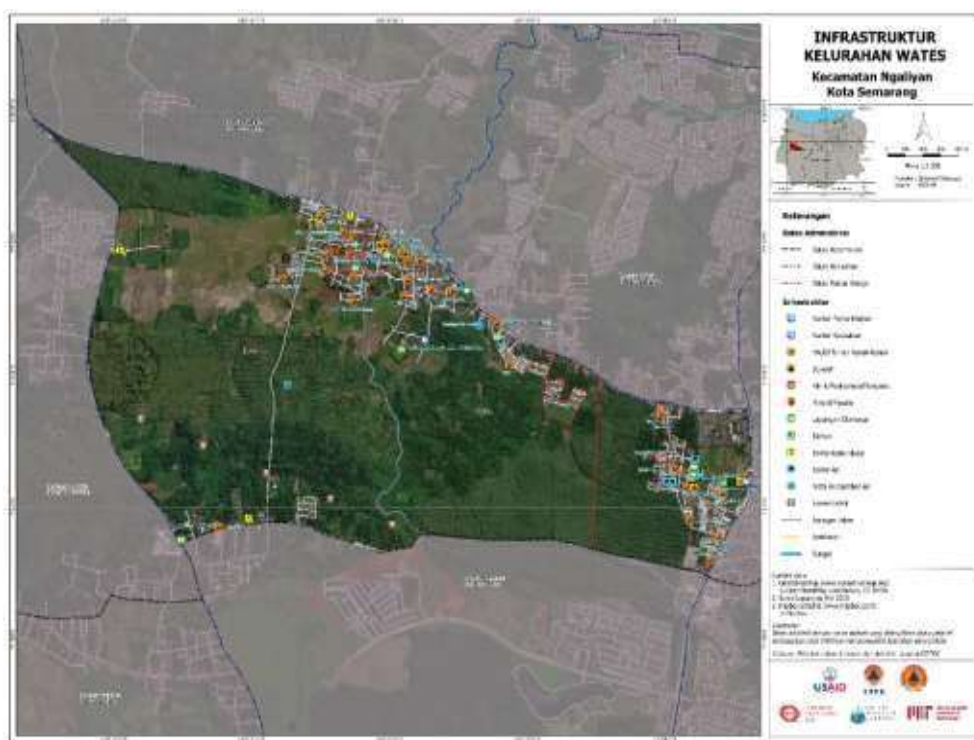
Pembangunan Kota Semarang pada bidang Pendidikan memiliki maksud untuk meningikan kuantitas dan kualitas manusia Indonesia terampil dan cerdas yang diiringi rasa percaya diri yang tinggi serta perilaku,sikap,dan sifat yang ulet dan inovatif, disedangkan itu adalah proses budaya untuk meningkatkan harga diri dan martabat seorang manusia yang akan terasa seumur hidup terutama di lingkup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Kota Semarang Sebagai ibu kota provinsi, penduduknya mendalami pendidikan lebih lama. Hal ini ditampilkan pada indikator rata-rata lama sekolah yang mencapai 10,8,7 tahun, atau memutuskan stop bersekolah ketika kelas 1 SMA berbasiskan data yang di dapat dari BPS Kota Semarang 2021. Pada tahun akademik 2021-2022 jumlah perguruan tinggi di Kota Semarang tercatat sebanyak 73 perguruan tinggi, yang terdiri dari 3 perguruan tinggi negeri dan 70 perguruan tinggi swasta

B. Kelurahan Wates

Peta Kelurahan Wates

Gambar 3.1



Sumber : <https://openstreetmap.id/peta-kelurahan-semarang-kecamatan-a-n/> akses pada 22/11/2022.

1. Data Demografi Kelurahan Wates

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2020, akan ada 5.495 jiwa yang mendiami 1.790 KK di Kelurahan Wates yang terletak di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dalam hal jenis kelamin, akan ada 2.710 laki-laki yang tinggal di negara ini pada tahun 2020, lebih banyak dari 2.785 perempuan.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 3.3

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 s/d 4	404	439	843
5 s/d 9	191	205	396
10 s/d 14	203	205	408
15 s/d 19	219	185	404
20 s/d 24	241	255	496
25 s/d 29	242	250	492
30 s/d 34	235	302	537
35 s/d 39	235	273	429
40 s/d 44	228	196	424
45 s/d 49	174	154	328
50 s/d 54	127	119	246
55 s/d 59	91	84	175
60 s/d 64	35	46	81
>65	85	72	157
Jumlah	2710	2785	5495

Sumber: Data Monografi Kelurahan Wates 2020

Penduduk belum produktif, usia produktif, dan non produktif, seperti terlihat pada tabel di atas. Mereka yang berusia di bawah 15 tahun merupakan penduduk yang tidak produktif. Penduduk pada usia ini dianggap sebagai penduduk yang belum mampu bekerja dan menghasilkan barang atau jasa. Penduduk usia produktif adalah penduduk dalam rentang usia 15-64 tahun. Populasi pada usia itu dipandang mampu menghasilkan tenaga kerja dan produk dalam siklus penciptaan. Meskipun di kelas terakhir adalah penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun, individu yang memasuki usia ini belum siap untuk menciptakan tenaga kerja dan produk dan hidup mereka ditanggung oleh penduduk atau keluarga yang dikenang karena usia produktif.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Melihat dari rata-rata masyarakat penduduk kelurahan wates menempuh pendidikan pada tingkat SLTA berjumlah 1.434 orang, selanjutnya yang melalui pendidikan pada tingkat SMP, mencapai 1.229 orang dan yang melalui pendidikan tingkat SD 515 orang dan lain sebagainya.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 3.4

JENIS PENDIDIKAN	BANYAK ORANG
Perguruan Tinggi	237
Tamat Akademi	128
Tamat SLTA	1434
Tamat SLTP	1229
Tamat SD	515
Tidak Tamat SD	840
Belum Tamat SD	295
Tidak Sekolah	634
Jumlah	5312

Sumber: Data Monografi Kelurahan Wates 2021

Jenjang pendidikan tertinggi menurut data penduduk adalah SMA sebanyak 1.434 orang, disusul SMP sebanyak 1.229 orang. Namun, masih ada kekurangan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Wates tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu imbas dari rendahnya status ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang berdampak pada jenis pekerjaan, kesadaran lingkungan, kegiatan sosial budaya, bahkan ekonomi masyarakat dan perkembangan masyarakat.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Penduduk berbasis mata pencaharian atau pekerjaan. Menurut data yang tersedia saat ini, tenaga kerja industri menyumbang 1071 persen dari semua sumber pendapatan. 513 orang kemudian bekerja sebagai buruh bangunan. Bekerja sebagai buruh tani dan mencari nafkah, 379 orang, dan seterusnya diikuti dengan profesi lainnya sehingga memiliki jumlah total 2553. Tanpa adanya profesi nelayan karna Kelurahan Wates jauh dari laut maupun pantai.

Tabel 2 Jumlah Jenis Pekerjaan Tabel 3.5

Buruh Tani	379
Nelayan	-
Pengusaha	22
Buruh Industri	1071
Buruh Bangunan	513
Pedagang	92
Pengangkutan	29
Pegawai Negri	36
Pensiun	24
Lain-lain	167
Jumlah	2553

Sumber : *Data Monografi Kelurahan Wates 2021*

Secara umum perekonomian di Kota Wates sangat lengkap di berbagai bidang mulai dari PNS, Peternak, Buruh Peternakan, Wawasan Bisnis, Buruh Pembangunan, Makelar, dll. Masyarakat Desa Wates lebih banyak bekerja sebagai buruh industri karena 130- elevasi meter dan dekat dengan kawasan industri. Di bidang hortikultura, permintaan cenderung berkurang dan hanya dikuasai oleh daerah setempat dan banyak anak muda sudah mulai pulang sebagai peternak.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat, dan perspektif dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama dapat dipengaruhi oleh adat istiadat di daerah setempat, dan agaman juga merupakan komponen penting dalam penerapan pendekatan dalam masyarakat, sehingga perlu untuk diidentifikasi. Sementara itu jumlah penduduk Kelurahan Wates berdasarkan agama mayoritas penduduk Kelurahan Wates beragama Islam.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

JENIS AGAMA	BANYAK
Islam	5367
Kristen Katholik	61
Kristen protestan	59
Budha	4
Hindu	4
Lain Lain	-
Jumlah	5995

Sumber: Data Monografi Kelurahan Wates 2020

Menurut tabel sebelumnya, 5367 orang merupakan mayoritas penduduk Muslim di Desa Wates. Sebaliknya, hanya sebagian kecil penduduk yang memeluk agama Katolik, dengan total 61 orang beragama Kristen, 59 orang beragama Budha, dan penduduk yang beragama Budha. Keadaan infrastruktur ibadah dipengaruhi oleh hal ini. Kecamatan Wates saat ini memiliki dua masjid dan lima musala, namun candi atau vihara Hindu maupun Budha tidak berfungsi sebagai tempat ibadah. Budaya masyarakat dan kegiatan sosial terkena dampak dari kondisi ini.

Mayoritas penduduk yang tinggal di Kelurahan Wates beragama Islam, dengan sedikit pemeluk Hindu dan Budha. Nilai-nilai Islam masih sangat kental di Desa Wates. Misalnya, kegiatan *yasinan* untuk perempuan tetap dilakukan seminggu sekali, khususnya pada Kamis siang. Sedangkan kegiatan *yasinan* bapak-bapak dilakukan setiap malam jumat dengan berpindah-pindah dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal lainnya. Selain itu, ketika umat merayakan syukuran atau *slametan*, mereka tetap mengundang tetangga dari kedua belah pihak dan membuat nasi kotak, menunjukkan nilai-nilai Islam dan budaya yang langgeng. (Wawancara dengan Bu Shofi Lurah Wates 17 April 2023)

Berdasarkan penjelasan bu Shofi bisa penulis perhatikan terkait kegiatan rutin yang sampai saat ini masih terjaga oleh warga yakni acara yasin, tahlil, kliwonan. Aktivitas ini mempengaruhi pendekatan pemberdayaan masyarakat; pendekatan yang menggunakan nilai-nilai keislaman adalah yang terbaik. Dimana agama islam pun mejadi masyoritas di Kelurahan Wates. Sehingga pendekatan ini juga yakni basis keagamaan, hal sangat di sarankan dan tak lupa dengan sikap toleransi antar umat beragama yang ada dilingkungan Wates, sehingga harapanya dapat tercipta paguyuban masyarakat yang harmonis.

Sehingga dapat terlaksana salash satu visi misi dan juga jargon kota Semarang yakni "Variety of Culture". "Variety of Culture" artinya kota Semarang tumbuh dan mempercantik diri dengan tetap menjaga keragaman budayanya. Pesan yang disampaikan adalah secuil harmonisasi masyarakat Jawa yang berbeda dengan masyarakat Tionghoa, Arab dan Belanda pasti terasa di kota Semarang. (semarangkota.go.id, 2022).

C. Struktur Organisasi Kelurahan Wates

Gambar 3.6

Struktur Organisasi



Sumber : <https://wates.semarangkota.go.id/strukturorganisasi>

Di Indonesia, kelurahan adalah pembagian wilayah administratif setelah kecamatan. Lurah bertanggung jawab atas kelurahan sebagai perangkat daerah kota. Seorang lurah (PNS) memimpin kelurahan. Desa setingkat dengan kelurahan. Anggota organisasi yang bertindak sebagai aparat pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab berikut saat membantu masyarakat :

1. Lurah

Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat ditingkat kecamatan dan setara dengan kepala desa akan tetapi lurah di tunjuk oleh walikota bukan pilihan rakyat. Melalui Camat, Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada Lurah, dan Lurah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Lurah mempunyai fungsi yakni:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kecamatan

- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- c. Pengoordinasi segala agenda dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial
- d. Pembinaan kepada warga masyarakat dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Pengoordinasian tugas dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan penduduk;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepala lingkungan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah melalui camat sesuai bidang tugas dan fungsinya
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala daerah melalui camat sesuai standar yang ditetapkan.

2. Sekertaris Lurah

Sekretaris lurah bertanggung jawab untuk membantu lurah dalam mengatur pelaksanaan pembinaan administrasi. Pembinaan administrasi mencakup administrasi, manajemen, kerumahtanggaan, kehumasan, perlengkapan, kepegawaian, pendataan, pelaporan, dan bahan untuk menyusun rencana program, serta keuangan dan penyediaan layanan teknis dan administrasi kepada lurah dan seluruh unsur kelurahan :

- a. Menyusun program kerja kelurahan
- b. Melaksanakan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, pengaduan dan kepegawaian dilingkungan kelurahan.
- c. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, ekonomi, pembangunan, pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan kelurahan;
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah kelurahan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai bidang tugasnya.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada lurah sesuai standar yang ditetapkan.

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos)

Kasi Kesejahteraan Sosial adalah perangkat kelurahan yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Kesejahteraan Sosial biasa disingkat Kasi Kesos. Atau juga dengan kalimat lain bahwa kepanjangan kasi kesos adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kasi Kesos Kelurahan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya. Kepala seksi kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) ini bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas tersebut, Kasi Kesos juga bertugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- c. Melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan kesejahteraan sosial
- e. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- f. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- g. Membantu tugas Sekretaris Desa dalam membuat perencanaan mulai dari Data Umum Desa, Visi Misi Desa, Data Kependudukan, DTKSM, RPJMDes dan RKPDes
- h. Membantu sekretaris desa dalam pembuatan RAPBDes, APBDes dan Perubahan APBDes
- i. Membantu Sekretaris Desa dalam pengentrian data kedalam siskeudes
- j. Membantu Sekretaris Desa dalam membuat laporan dan Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya
- k. Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam pengelolaan DTKS

4. Pengelola Tata Belanja dan Keuangan

Jabatan ini memiliki tugas dibidang pengelolaan data keuangan dan pelaporan keuangan dan Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,

koordinasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis. Serta memiliki tugas dan fungsi yakni pertama Menghimpun berkas di bidang keuangan. Kedua Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas. Ketiga Menyusun laporan berdasarkan prosedur yang berlaku Keempat Melaporkan perkembangan realisasi keuangan sebagai bahan pertimbangan evaluasi kegiatan di Kelurahan

5. Staf Pelayanan

Staf pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kegiatan di Bidang Pelayanan Masyarakat. Salah satunya di bidang surat menyurat yakni Membuat, Mencatat, mendata Surat Masuk dan Surat Keluar serta menerimamasukan dan saran dari masyarakat.

6. Petugas K3

Petugas K3 bertugas sebagai penyedia Fasilitas yang ada di kelurahan baik untuk kegiatan sehari hari maupun kegiatan tahunan. Petugas K3 juga bertugas memperbaiki dan merawat alat alat perkantoran yang menunjang kegiatan kelurahan.

D. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

Bansos BLT BBM adalah program perlidunan sosial jangka pendek yang di ambil oleh pemerintah dengan tujuannya adalah membantu masyarakat yang termasuk kategori miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak inflasi yang sangat berbahaya dan juga kenaikan harga bahan pangan (Wibawa, 1994)

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Istilah "mendekati miskin" mengacu pada orang miskin, miskin, dan rumah tangga, tetapi jalur Covid-19 kemungkinan besar tidak akan berfungsi sebagai katalisator bangsa. Sehubungan dengan itu, program BLT merupakan satu-satunya program yang dikembangkan dengan tujuan mempelajari mata pelajaran kemiskinan. Tujuannya untuk membantu masyarakat memahami penelitian kemiskinan dengan menentukan harga kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan harga yang tinggi. (Tangkilisan, 2003)

Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) adalah bantuan

keuangan dari dana desa untuk keluarga miskin yang diberikan oleh pemerintah untuk memitigasi dampak inflasi dan kenaikan harga BBM nasional. BLT BBM diberikan kepada setiap keluarga miskin. BLT BBM diberikan dalam dua tahap dengan besaran Rp. 300 ribu rupiah untuk setiap distribusi. Bulan September menandai dimulainya penyaluran, yang akan berlanjut hingga November 2022. BLT BBM direncanakan untuk keluarga kurang mampu dengan cicilan tunai yang diperoleh dari Pemerintah Pusat untuk sedikit mengurangi dampak finansial dari kenaikan harga BBM. (jdih.bappenas.go.id, 2022)

Kebijakan Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas karena kehadiran BLT BBM di tengah masyarakat. Program Bantuan Langsung Tunai dirancang untuk membantu masyarakat miskin, khususnya mereka yang kondisi keuangannya masih genting dan lemah.

BAB IV

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BLT BBM DI KELUARAHAN WATES

A. Latar Belakang Program BLT BBM

Berdasarkan arahan Presiden pada Keputusan Dirjen Pemberdayaan sosial Nomor 158 Tahun 2022 tentang Subsidi Pengalihan BBM. dalam melaksanakan program bansos tunai langsung BBM untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2022 sebagai alternatif subsidi BBM bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi) dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial langsung tunai BBM.

Untuk mengurangi penyimpangan dalam penyaluran bansos langsung tunai BBM, penyaluran bansos langsung tunai BBM dilakukan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Hal ini memudahkan pemantauan dan evaluasi penyaluran bansos langsung tunai BBM. Sehubungan dengan itu, Kementerian Sosial menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan September, Oktober, November, dan Desember 2022 sebagai acuan bagi penyelenggara kegiatan untuk melaksanakan penyaluran bantuan. program tunai bantuan sosial. (Kompas, 2022)

B. Maksud dan Tujuan Program BLT BBM

Pokok-pokok dan sasaran penyampaian bantuan langsung tunai BBM direncanakan, Pertama, sebagai instrumen yang sah dalam pelaksanaan percepatan peredaran bantuan langsung tunai BBM dengan struktur perluasan biaya produk yang mencekik karena kenaikan biaya minyak masyarakat. dan pendistribusian selesai pada periode September, Oktober, November dan Desember 2022, Kedua, peningkatan kelayakan, kecakapan, keterusterangan, demokratisasi dan tanggung jawab dalam sosialisasi bantuan tunai langsung bahan bakar minyak untuk periode September, Oktober, November dan Desember 2022, Ketiga, memberikan data dan pemahaman tentang percepatan penyaluran bantuan tunai langsung BBM, keempat memberikan pedoman untuk mengatasi hambatan atau permasalahan dalam peredaran bantuan tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober,

November dan Desember tahun 2022.

Maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dan maksud dari di keluarganya kebijakan bansos BLT BBM oleh kementerian keuangan dan kementerian sosial sebagai pelaksana, untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga bbm di akhir tahun 2022 yang di anggap berbahaya dan dapat menjadikan inflasi dan juga mengurangi daya beli warga masyarakat sehingga ekonomi di indonesia dapat terganggu, karna selamma ini di anggap subsidi dari BBM sendiri kurang tepat dan menuru data yang menikmati subsidi ini adalah dari kalangan ekonomi menengah.

C. Kriteria Penerima BLT BBM

Untuk kriteria penerima Bansos bantuan Langsung tunai BBM adalah mereka yang datanya diambil dari data DTKS. Dalam BLT BBM ini Kelurahan Wates memberi keleluasaan kepada RT RW untuk memberi pendapat serta usulan tentang data masyarakat yang selama ini perekonomiannya tidak baik, untuk diusulkan kepada dinas Sosial supaya warga tersebut mendapatkan bantuan sosial sebagai kelompok Non-DTKS ataupun masyarakat bisa dimasukkan ke dalam DTKS jika memenuhi persyaratann yang sudah diberlakukan pemerintah.

Basis Data Terpadu (BDT) dulunya dan sekarang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATA TIN- KESOS) Kementerian Sosial.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan terukur, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1. Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti fakir miskin dan anak terlantar; Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti (KPM PKH) - keluarga penerimamanfaat – program sembako (KPM Sembako);
2. potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Adapun syarat agar masyarakat bisa mendaftarkan diri atau didaftarkan DTKS, dimana persyaratan DTKS di atur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas kriteria kemiskinan. Menurut Kemensos RI, kriteria kemiskinan meliputi :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
- d. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- e. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester
- f. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- g. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- h. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
- i. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang
- j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- k. Penghasilan kurang dari 600.00 ribu rupiah

Berdasarkan permintaan persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwasanya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin didaftarkan di DTKS adalah sebagai berikut: mereka tidak memiliki tabungan simpanan; mereka tidak memiliki dinding bambu atau kayu yang berkualitas rendah; mereka tidak memiliki lantai plester yang terbuat dari tanah atau kayu; mereka tidak memiliki dinding yang terbuat dari bambu atau kayu yang murahan;

dan rumah mereka tidak memiliki luas bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang itu menjadi ciri fisik yang dapat dilihat langsung oleh mata, penetapan persyaratan ini juga di harapkan mampu sesuai pelaksanaan dan pendataanya ketika di lapangan sehingga tujuan dari bansos sendiri dapat tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima manfaat atau KPM.

D. Nilai dan Waktu Penyaluran BLT BBM

Nilai bantuan langsung tunai bahan bakar minyak period Se tember, Oktober, November dan Desember tahun 2022 sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM/bulan, sehingga total bantuan sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang disalurkan secara tunai oleh PT. POS IN donesia (Persero) Tbk.

Waktu penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilaksanakan di bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 dengan 2 (dua) kali penyaluran pada bulan September dan Akhir November tahun 2022 atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang ada di daerah, seperti yang peneltii teliti adalah proses pelaksanaan pendistribusian BLT BBM di lakukan secara serentak di Kecamatan Ngaliyan dari 10 kelurahan yakni, Kelurahan Wates, Ngaliyan, Tambakaji, Gondoriyo, Podorejo, Bancabkerep, Kalipancur, Purwoyoso, Bringin, Wonosari.

E. Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai BBM di Kelurahan Wates

Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BBM tentunya terdapat pelaksana dan juga mediator yang turut andil dalam mengumpulkan aspirasi dan data masyarakat serta ikut dalam Penyaluran BLT BBM. Hal ini Para Pelaksana Bantuan Langsung Tunai memiliki Tugas dan tanggung jawab masing terkait, Bantuan Langsung Tunai BBM agar tujuan dari Bansos BLT BBM dapat tepat sasaran dan berjalan baik dan alncar sesuai dengan harapan masyarkat dan pemerintah pusat, Tugas para pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial adalah perangkat kelurahan yang berfungsi sebagai salah satu bagian pelaksana teknis yang membantu lurah melaksanakan tugas operasional. Ini biasanya disingkat menjadi Kasi Kesos, atau kadang-kadang disebut sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Kasi Kesos Kelurahan berfungsi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pengelolaan keuangan desa dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Kasi Kesos, kepala seksi kesejahteraan sosial, bertanggung jawab untuk membantu Lurah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Kasi Kesos juga bertanggung jawab atas tugas tersebut :

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- b. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kesenian dan kebudayaan
- c. Melakukan pendataan penderita cacat, tuna karya dan tuna wisma
- d. Mengumpulkan data untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat
- e. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat
- f. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya
- g. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan lain-lainnya
- h. Melakukan pendataan korban bencana alam
- i. Mempersiapkan pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai bidang tugasnya
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada lurah sesuai standar yang ditetapkan

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai aparat Kelurahan khusus Kasi Kesos memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan bantuan Langsung Tunai jika diibaratkan Kasi Kesos menjadi

akar dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena Kasi Kesos menjadi awal untuk Mengerakana dan Menginfokan Terkait pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Nasional

Informasi mengenai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebelum disampaikan kepada masyarakat hal ini disampaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan kemudian kementerian Sosial kemudian disalurkan ke Dinas Sosial kemudian disalurkan ke kecamatan baru dari kecamatan disalurkan ke kelurahan. Penyaluran bantuan Langsung tunai kepada masyarakat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat Kelurahan khususnya Kasi Kesos.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan bantuan sosial tunai di sebuah Kelurahan juga menjadi tanggung jawab Kasi Kesos. Peran Kasi Kesos dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai ini adalah Pertama, Penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial terkait usulan penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT), Kedua, Mengkoordinasi dengan pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti team IT Kelurahan, PSM, dan RT RW, Ketiga, Mengatur jalannya pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST), Keempat Bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat pelaksanaan Bantuan Langusng Tunai (BLT)

“Sebagai Kasi Kesos sudah tanggung jawab kami dan tim, mulai dari pendataan, penginformasian dan juga pelaksaan di lapangan berbagai bantuan sosial yang ada di lingkungan kelurahan kami, khususnya pelaksanan bantuan langsung tunai BLT BBM ini yang terbaru yang mana info dari pak camat akan di laksanakan jadi satu 10 Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, (Wawancara Ibu Nurikha Kasi Kesos Kelurahan Wates 23 September 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara yang peneliti lakukan di atas dapat di simpulkan bahwa alur penyaluran blt bbm di kelurahan, di mulai melalui Pendataan Warga KPM, Penginformasian dan Pelaksanaa yakni penyaluran BLT BBM di Kecamatan Ngaliyan.

2. Informasi Teknologi Kelurahan

IT kelurahan atau bisa disebut sebagai operator adalah orang yang bekerja dilabalik layar yang menghandle mengenai data data adminsitrasi kependudukan, mengkordinir Jaringan Internet atau Online untuk saat ini Operator Desa mengelola Website Desa, E-Inpaq, Input RPJM dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang berbasis Internet yang jadi Perioiritas Operator adalah mengerjakan Siskeudes atau menginput APBDesa kedalam aplikasi tersebut. Adapun tugas IT atau operator di Kelurahan atau desa adalah sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Sekretaris Desa dalam membuat perencanaan mulai dari Data Umum Desa, Visi Misi Desa, Data Kependudukan, DTKSM, RPJMDes dan RKPDes
- b. Membantu sekretaris desa dalam pembuatan RAPBDes, APBDes dan Perubahan APBDes
- c. Membantu Sekretaris Desa dalam pengentrian data kedalam siskeudes
- d. Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya
- e. Membantu Sekretaris Desa Dalam membuat laporan
- f. Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam pengelolaan DTKS

" tugas saya sehari harinya bekerja di balik layar dan saya kebetulan ikut menangani pelayanan, tugas di blaik layar guna memasukan, dan meninjau ulang data-data masyarakat di DTKS. ketika kebijakan bantuan sosial tunai tersebut hadir jadwal pelaksanaan bantuan sosial tunai dan RT RW sudah mengumpulkan usulan-usulan masyarakat yang akan didaftarkan sebagai calon penerima bantuan sosial tunai atau dimasukkan di DTKS saya didampingi oleh kasi kesos menginput atau memasukkan data tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Sosial" (Wawancara Rome IT atau Operator Kelurahan Wates 23 September tanggal 2022)

Di Kelurahan Wates, tim IT atau operator bekerja di balik layar selama pelaksanaan bantuan sosial. Tim ini menangani data masyarakat, seperti menginput dan mengedit data masyarakat di aplikasi atau situs web DTKS, dan membulatkan surat form DPP 5 yang harus dilampirkan jika penerima bantuan sosial tunai diwalkilkan oleh sanak saudara mereka. Selain itu, terlibat secara tidak langsung dalam proses pendataan penduduk yang berhak atas bantuan sosial

3. PSM Kelurahan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki jiwa pengabdian sosial, keinginan, dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan telah mengikuti pelatihan atau bimbingan di bidang kesejahteraan sosial. PSM dibuat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara luas

Kedudukan dan tugas PSM yakni:

- a. PSM wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional
- b. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima pada kesehariannya
- c. Mengusulkan rencana program Kesejahteraan Sosial sesuai kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatkan kemampuan warga untuk tugas kesejahteraan dan pemecahan masalah
- e. Mengefektifkan kemampuan warga dalam tugas-tugas kehidupan dan pemecahan masalah
- f. Perantara penyandang masalah dengan sumber- sumber kesejahteraan sosial
- g. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber kesejahteraan sosial
- h. Menyediakan informasi prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
- i. Memberikan sumbangan bagi perubahan dan perbaikan masyarakat

Sangat penting bagi PSM atau pekerja sosial masyarakat untuk tetap terlibat saat pelaksanaan bansos tunai karena mereka harus berkomunikasi Kasi dengan Kasi Kesos tentang kondisi di lapangan selama pelaksanaan kontrol. tanpa PSM, pelaksanaan bansos bantuan langsung tunai tidak akan berjalan dengan lancar karena PSM membantu kasi kesos di lapangan atau turun langsung memberikan bantuan. Salah satu tanggung jawab PSM adalah melaksanakan bantuan sosial tunai.yang mana tugasnya sebagai berikut:

- a. Meninjau masyarakat yang namanya tercantum dalam Penerima bantuan
- b. Melakukan koordinasi dengan Kasi Kesos Kelurahan terkait peninjauan
- c. Meminimalisir terjadi miskomunikasi saat pelaksanaan bantuan sosial
- d. Mendampingi saat pelaksanaan bantuan sosial tunai

Dengan penjelasan tugas dan tanggung jawab di atas maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu PSM Kelurahan untuk mengala informasi lebih dalam

"PSM Berkordinasi terus mas dengan kasi kesos kelurahan Wates dalam pelaksanaan bantuan sosial. PSM membantu kasi kesos secara langsung. Saya meninjau beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial namun peninjauan yang saya lakukan hanya beberapa RT RW saja. Saat pelaksanaan bantuan Langsung tunai Biasanya saya melakukan pendampingan secara langsung saat di lapangan pada pelaksanaan bantuan Langsung tunai hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk membantu Kasi Kesos terkait pelaksanaan bantuan sosial tunai di lapangan selain itu pendampingan saat pelaksanaan bantuan Langsung tunai untuk mengatasi problem-roblem kecil yang kadang kita tidak terprediksi saat diskusi dengan Kasi Kesos" (Wawamcara ibu Anna PSM Kelurahan Wates tanggal 23 September 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara di Atas bahwa Terdapat Peran PSM Kelurahan dalam peninjauan warga yang Namanya tercantun dalam calon penerima BLT BBM, sehingga Bantuan ini harapaanya mulai dari endataan dan pelaksaan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Akan tetapi dalam proses peninjauan tidak semua warga PSM Survei karna cakupan Kelurahan Wates yang luas dan memerlukan bantuan dari RT dan RW serta Ibu Ibu PKK yang juga bersinggungan langsung dengan warga.

4. RT dan RW

RT Rukun Tangga dan RW Rukun Warga merupakan suatu lingkungan kerja pelaksanaan program kemasyarakatan kelurahan dan desa, yang bersinggungan langsung dengan warga sehingga berperan sebagai kepanjanga tangan dari penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah kelurahan, daerah maupun nasional dan juga sebagai pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat. RT RW sebagai salah satu pelaksana kebijakan bantuan sosial tunai juga memiliki peran dan andil yang penting dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai. Karena RT RW bertugas untuk mengumpulkan dan meninjau masyarakat yang benar benar terdampak kemudian diusulkan kepada Kelurahan agar diajukan sebagai penerima bantuan sosial tunai.

“njih mas memang biasanya ketika ada program bantuan sosial saya selalu di hubungi oleh pihak kelurahan untuk mendata warga yang berhak menerima bantuan dan memberikan informasi via wa atau surat kepada warga yang menjadi calon penerima bantuan” (Wawancara dengan Bapak Fauzan Salah Satu RT di Kelurahan Wates)

Dalam hal ini aparat Kelurahan khususnya kasi kesos memberikan amanah dan tugas kepada RT RW untuk melakukan pemberian informasi, pendataan dan tinjauan secara langsung terkait program BLT BBM kepada warganya yang pada masa kenaikan harga bahan bakar minyak ini terdampak.

5. Peranan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga juga dikenal sebagai PKK adalah gerakan nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan gender, dan kesadaran hukum dan lingkungan. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 1, memberikan pengertian PKK ini.

Peranan PKK adalah kelompok organisasi yang menjalankan berbagai kegiatan keterampilan, mulai dari Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan Kelurahan lingkungan. PKK sangat penting bagi publik karena merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi bangsa dan rakyatnya. Bahkan PKK ditugaskan untuk menyelesaikan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang secara eksplisit menyatakan bahwa PKK mendukung dan bermaksud membantu pemerintah dalam proses pembangunan kekuatan yang ada di masyarakat. Bahkan dalam struktur organisasi, berada di bawah naungan departemen dalam negeri, dan ketuanya di tingkat desa adalah istri kepala desa. Visi dan misi PKK, bersama dengan sepuluh program dakwah PKK sendiri, membentuk peran PKK :

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. Gotong royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- f. Pendidikan dan ketrampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan koperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Bu Lurah Selaku pengambil keijakan pemerbedayaan ibu ibu PKK dalam proses pendataan penerima bantuan sosial BLT BBM bagi warga yang berhak masuk dalam data DTKS dan penerima bansos

“njih mas dalam pelaksanaan penyeleksian warga yang berhak menerima bantuan, kami juga menerima pendapat dari ibu ibu pkk. di hari jumat setelah pengecekan jentik rutin kami biasa berkumpul di rumah pak rt atau warga setempat yang bersedia rumahnya di tempati untuk diskusi, berkumpul dan membahas terkait daftar nama nama yang benar benar membutuhkan diskusi tersebut biasa di pimpin langsung oleh bu kasi kesos, saya sebagai lurah hanya sambutan dan memberikan beberapa masukan saja (Wawancara Ibu Sofi Lurah Kelurahan Wates tanggal 23 September 2022)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bu lurah bahwa dalam program BLT BBM ini, mulai dari pendataan terdapat Peran Kasi kesos, PSM Kelurahan, RT RW dan Ibu Ibu PKK yang turut andil dalam proses penyeleksian waga yang berhak menerima manfaat, hal ini karnakan keterbatasan RT RW dan PSM dalam Peninjauan langsung sehingga ibu ibu pkk di minta pendapatnya karna PKK juga bersinggungan langsung dengan warga. Kemudian adanya Juga Forum Sebagai diskusi Untuk Meninjau Kembali data yang di dapat oleh Kasi Kesos, yakni yang di ikuti oleh PKK. dan biasanya dilkansanan Ketika selesai pengecekan rutin jentik setiap hari jumat.

6. PT POS INDONESIA

Sebagai mitra di Kementerian Sosial, PT Pos Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyaluran pembayaran tunai langsung untuk belanja modal sebagai pendorong utama inflasi dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran tunai langsung BBM. Sumbu utama dari proses ini adalah pengendalian internal di PT Pos Indonesia. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembayaran tunai langsung, kalender keuangan fisik yang dipercayakan langsung oleh Kementerian Sosial dan pimpinan PT Pos Indonesia bertugas menyediakan pembayaran tunai langsung. Oleh karena itu, dalam rangka mengatur dan juga mengkoordinasikan penyaluran bansos kepada penyandang disabilitas, kantor pos selalu menjalin kerjasama yang erat dengan masyarakat. Setelah PT Pos Indonesia dicopot sebagai pelaksana mal, tim perencana juga akan mendapat bantuan dana dari pemerintah jika keluarga mendapat gaji. Karena berwenang melakukan pembayaran langsung ke warga, PT Pos Indonesia juga akan mengarahkan bantuan keuangan ke rekening anggota masyarakat. PT Pos Indonesia karena PT Pos Indonesia merupakan mitra utama Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun, otoritas ini tidak mengawasi distribusi bantuan sosial kepada orang cacat atau mengelola tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan. Terkait pemberian bansos BBM, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Wates secara rutin berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia terdekat di Kelurahan Wates sendiri.

“saya selalu berkomunikasi dengan PT pos Indonesia terkait penyerahan bantuan sosial tunai ini mas, karena kami hanya memiliki kewenangan untuk mendata masyarakat saja PT pos yang mengatur jadwal dan jalannya pelaksanaan bantuan sosial tunai ini. Dan yang perlu mas ari ketahui bahwasanya kantor pos itu tidak hanya menyerahkan di Kecamatan saja, jadi kalau ada masyarakat yang tidak bisa datang ke kecamatan karena sudah sakit atau sudah tidak bisa kemana-mana contohnya itu biasanya itu banyak nenek yang tidak bisa datang ke kecamatan jadi nanti kami dan juga PT Pos Indonesia memberikan bantuan sosial tunai ke rumahnya jadi kami mendatangi rumahnya misalkan ada si mbah itu nggak bisa dateng untuk mengambil bantuan sosial tunai karena sudah sepuh nggak bisa kemana-mana jadi nanti saya mendampingi PT pos Indonesia menyerahkan secara langsung ke rumah si-mbah tersebut dan saat meyerahkan nanti akan kami foto sebagai bukti atau laporan bahwasanya ada warga yang tidak bisa mengambil bantuan sosial tunai secara langsung, biasanya itu saya atau PSM bersama PT pos Indonesia memberikan langsung ke rumah warga yang tidak bisa mengambil bantuan sosial bersama PT Pos Indonesia" (Wawancara dengan Ibu Nurikha Kasi

Kesos Kelurahan Wates tanggal 28 Oktober 2022)

Dari Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Peran PT pos Indonesia amat sangat penting dalam kelancaraan penyaluran bansos bantuan Langsung tunai BBM ini, karena PT pos Indonesia di ibaratkan seperti kepanjangan tangan kementerian Sosial untuk memberikan secara langsung kepada masyarakat, Dalam hal pembagian bantuan sosial tunai, bantuan sosial tunai didistribusikan secara langsung oleh PT Pos Indonesia dan didampingi oleh pihak kelurahan, terutama PSM, sebagai saksi bahwa bantuan sosial tunai benar-benar diberikan kepada masyarakat..

Gambar 4.1



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas adalah proses pengambilan bansos BLT BBM. Apabila ada masyarakat berhalangan untuk hadir atau memang tidak bisa mengambil secara langsung, PT pos Indonesia bersama Kelurahan khususnya PSM akan menyerahkan bantuan sosial tunai tersebut di rumah bagi yang tidak bisa mengambil karena ada suatu hal misalkan sakit dan biasanya hal ini terjadi pada lansia. Jika ada masyarakat yang belum mengambil bantuan sosial tunai maka masyarakat akan diarahkan ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan sosial tunai karena Kelurahan tidak ada hak untuk menyimpan sisa bantuan yang belum diambil oleh masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan bahwa peneliti menggambarkan secara umum dalam penyaluran BLT BBM di Kelurahan Wates

yakni Pendataan KPM dilaksanakan oleh kasi kKetika medapatkan Informasi dari Kecamatan akan hadirnya program BLT BBM, Kedua RT RW Melakukan Pendataan Kepada Warganya yang menjadi calon penerima bantuan, PSM Melaksanakan Peninjauan Langsung Kepada warga calon penerima bansos. PKK meninjau Kembali data calon penerima Bansos, dan Kasi Kesos menentukan dan menginfomasikan waga yang menjadi penerima bansos.

F. Mekanisme Pelaksanaan BLT BBM di Kelurahan Wates

1. Pendataan Warga

Mekanisme Pedataan Di Kelurahan Wates Yakni Pertama Setelah Kasi Kesos Mendapatkan Instruksi dari Kecamatan, Kedua Kasi Kesos Melaksanakan Pendataan dan Peninjauan Kembali terhadap KPM yang berhak masuk data DTKS di bantu Oleh RT dan RW Sebagai Pendataan Warga lingkungannya yang berhak Menerima BLT BBM, Ketiga Kemudian PSM Kelurahan Sebagai Peninjau Langsung di Lapangan, Serta Ibu Ibu PKK juga yang dilibatkan dalam Kegiatan Penyaringan Warga KPM yang Berhak Menerima Bantuan Langsung Tunai BBM. Terakhir Penginformasiaan Oleh Kasi Kesos Kepada RT dan RW tentang Warga KPM yang berhak mendapatkan BLT BBM.

2. Mekanisme Pelaksanan Bantuan Sosial BLT BBM

Mekanisme Keputusan direktur jendral pemberdayaan sosial Nomor 158/5/Hk.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis untuk program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak selama bulan September, Oktober, November, dan Desember 2022 menetapkan mekanisme formal untuk penyaluran bantuan sosial. Untuk program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, dana bantuan sosial ditransfer melalui pembayaran langung (LS) dari Kas Negara ke rekening penyalur. Sebelum didistribusikan oleh pos penyalur, rekening penyalur digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Surat perintah telah diberikan kepada bank tempat dibuka rekening penyalur oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk mengakui pemindahbukuan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke rekening pos penyalur. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

Pembagian bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (KPM) dilakukan oleh pos penyalur dengan memberikan uang tunai kepada KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Jika pos penyalur tidak dapat mengirimkan langsung bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyerahkan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM melalui :

- a. Pengambilan langsung oleh KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kantor pos penyalur; atau
- b. untuk KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang merupakan Lansia dan Penyandang Disabilitas berat, pos penyalur harus menyampaikan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke alamat KPM tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM

Direktorat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan pos penyalur melaporkan hasil Bantuan Sosial Bantuan Tunai Bahan Bakar Minyak melalui aplikasi OM-SPAN, yang dikelola oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kemudian setelah Turun Aturan dari Kemensos Muncul Mekanisme pelaksanaan dan pendataan bantuan sosial tunai dari dinkota, menurut Peraturan Walikota Semarang NOMOR 67 Tentang Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga dimana pelaksanaan bantuan sosial tunai diberikan dengan mekanisme yang lebih dipersingkat lagi:

- a. Ketua RT/RW setempat mengusulkan calon penerima ke kelurahan
- b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan
- c. petugas kelurahan melakukan input ke Info Bansos
- d. verifikasi oleh sistem terkait program bantuan sosial yang lain
- e. masuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial. DTKS sebagai acuan sasaran penerima Program Bantuan Sosial disiapkan Pusdatin Kesos

Kementerian Sosial

- f. Alokasi awal KPM per Kabupaten/Kota oleh Kementerian Sosial RI
- g. Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon KPM BST kepada Kemensos RI melalui persetujuan Bupati/Walikota dan diketahui oleh Gubernur melalui SIKS-NG;
- h. Penetapan KPM BST oleh Kementerian Sosial RI;
- i. Kementerian Sosial dan Keugan menyediakan anggaran Bansos;
- j. Proses penyaluran Basnoso dilakukan melalui mitra kerja (PT POS dengan dukungan Pemerintah pusat dan Daerah)
- k. Pengendalian dan sosialisasi Bansos dilakukan terpadu antara Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaa bansos baik blt maupun lainnya terdapat mekanisme formal dalam pelaksanaan BLT BBM Sebagai contoh agar petugas pelaksanaan di lapangan memiliki acuan dan juga dasar pelaksanaan sehingga Bansos ini bisa sampai kepada masyarakat dengan tepa tsasaran. Menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di lapangan.

Kemudian Untuk Pelaksanaan Penyaluran BLT BBM Tahap 1, Kali Ini Serentak di laksanakan di Kecamatan Ngaliyan yang terdiri dari 10 Kelurahan yang di bagi menjadi 3 hari. Yang mana kebijakan ini di ambil karna mengingat PT Pos Indonesia Sebagai Penyaluran BLT BBM hanya memiliki waktu yang singkat seerta SDM dan SDA yang kurang mencukupi, sehingga apabila Melaknsaankan di Kelurahan Masing - Masing akan memakan waktu.

“untuk pelaksanaan blt bbm kali ini serentak di kecamatan kabeh mas, kelurahan wates sendiri kebagian di hari pertama saya dan juga KPM ikut Mendampingi warga kami. Jadi kelurahan hanya terlibat dalam proses pendataan warga saja. (Wawancara Bu Nurikha Kasi Kesos Kelurahan Wates September 2023)

Dengan demikian Maka Kelurahan Wates hanya andil dalam pelaksanaan pendatan saja tidak ikut serta dalam proses penyaluran di Kecamatan Ngaliyan karna sudah diambil alih oleh Kecamatan dan juga PT Pos Indonesia. Pihak Kelurahan dan PSM Hanya Melakukan Pendampingan Saja.

"njih mas biasaya memang mitranya kemensos dengan PT POS, Sebagai Kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampiakna bansos secara langsung dan tugai kepada masyarakat, kami dari PSM tugasnya mendampingi saja warga yang mau ambil bansos, dan ditugaskan juga untuk menjadi saksi penyerahan bantuan sosial tunai ini amanah untuk menjadi saksi bahwa bantuan sosial tunai tersebut apakah benar-benar sudah disampaikan oleh PT pos Indonesia atau belum kepada masyarakat yang membutuhkan, biasanya ada beberapa warga yang tidak bisa mengambil atau memang nggak diambil itu nanti sisa uang atau bantuanya yang belum diambil tidak bisa di titipkan di kami, jadi kami tidak berhak untuk menyimpannya dan yang berhak untuk menyimpannya PT pos Indonesia jadi kami memang tidak ada wewnang untuk menyimpan atau memegang bantuan sosial tunai berupa uang, nanti jika masyarakat yang belum mengambil itu ngambilnya di kantor pos terdekat, di jerakah mas biasanya.(Wawancara dengan Ibu Anna PSM Kelurahan Wates tanggal 23 September 2022)

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bu Anna bahwa PSM ikut terlibat dalam penyaluran kepada warga yang tidak bisa hadir dengan menjadi saksi bahwa PT Pos Telah memberikan Bantuan dengan Bukti Foto Maupun video. PSM juga tidak dapat menyimpan uang tersebut dan bagi masyarakat yang memang benar tidak ada di rumah dapat mengambil langsung di PT Pos terdekat yang berada di jerakah.

BAB V

POLITIK DISTRIBUTIF BLT BBM DI KELURAHAN WATES

Politik distributif adalah suatu konsep penyaluran Sumber daya berupa barang jasa yang dilakukan oleh pemerintahan untuk kepentingan pemilu atau pejabat public. (Stokes S. e., 2013, p. 6) Proses pendistribusian sumber daya dalam politik tidak dapat dipisahkan. Memahami bahwa politik adalah arena alokasi dan distribusi sumber daya dikenal sebagai politik distributif. Segala sesuatu yang dapat membantu atau memberdayakan warga negara dalam hubungan kekuasaannya dengan pihak lain (politisi, pejabat publik) dianggap sebagai sumber daya. Secara empiris, istilah "sumber daya" mengacu pada barang sosial dan material. (Wardani, 2014)

A. Politik Distributif programatis

Politik distributif programatis memiliki peran perantara, yang tidak terdiri dari memobilisasi pilihan politik warga negara sesuai dengan kepentingan kandidat atau menggabungkan kepentingan kandidat dan pemilih. Perantara bertugas mengumpulkan informasi dan keinginan warga tentang permasalahan dan kebutuhan warga. Informasi dan keinginan yang dikumpulkan kemudian digunakan sebagai persyaratan sebagai semacam pemecahan masalah (Stokes dalam Palenewen 2014)

Dalam politik programatis paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan (Stokes S. e., 2013, p. 8) Pertama Pendistribusian harus bersifat Formal dan publik, Kedua kriteria formal dari distribusi harus benar-benar membentuk distribusi manfaat atau sumber daya yang sebenarnya yang di butuhkan masyarakat.

1. Petugas Pelaksana Program BLT BBM di Kelurahan Wates

Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BBM tentunya terdapat pelaksana dan juga mediator yang turut andil dalam mengumpulkan aspirasi dan data masyarakat serta ikut dalam Penyaluran BLT BBM. Para Pelaksana Bantuan Langsung Tunai memiliki Tugas dan tanggung jawab masing terkait Bantuan Langsung Tunai BBM, Tugas para pelaksana Bantuan Langsung Tunai BBM adalah sebagai berikut

a. Lurah

Lurah dalam hal ini bertugas sebagai pembinaan dan penanggung jawab pertama atas program kegiatan yang ada di kelurahan salah satunya dan khususnya kegiatan pelaksanaan bantuan sosial.

b. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesos bertugas sebagai Pertama Penghubung antara masyarakat dan dinas sosial terkait usulan penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT), Kedua Mengkoordinasi dengan pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti team IT Kelurahan, PSM, dan RT RW, Ketiga Mengatur jalannya pelaksanaan Bantuan Sosial, Keempat Bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

c. Informasi dan Teknologi

IT di Kelurahan Wates pada saat pelaksanaan bentuk sosial tunai. tim it atau operator bekerja di balik layar di mana tim it atau operator tersebut menghandle data-data masyarakat seperti penginputan data pengeditan data masyarakat di aplikasi atau website di DTKS, dan membuat surat form DPP 5 dimana formulir tersebut harus dilampirkan jika saat penerimaan bantuan sosial tunai penerima manfaat bantuan sosial tunai diwakilkan oleh sanak saudaranya maka harus melampirkan DPP 5 di mana DPP 5 tersebut dibuatkan oleh tim it atau operator Kelurahan. Serta ikut terlibat dalam proses pendataan warga yang berhak menerima bantuan sosial tunai

d. Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan (PSM)

PSM memiliki 4 tugas pokok yakni, Pertama Meninjau masyarakat yang namanya tercantum dalam Penerima bantuan, Kedua Melakukan koordinasi dengan Kasi Kesos Kelurahan terkait peninjauan, Ketiga Meminimalisir terjadinya miskomunikasi saat pelaksanaan bantuan sosial tunai Keempat Mendampingi saat pelaksanaan bantuan sosial tunai.

e. RT dan RW

Tugas Pokok RT dan RW dalam event bantuan sosial adalah meninjau kembali, mendata dan mengumpulkan data warga di lingkungan mereka yang berhak menjadi calon penerima bantuan sosial dan data di serahkan kepada kelurahan.

f. PKK

Ibu Ibu PKK Bertugas Sebagai Verifikator data dari RT dan RW. Sehingga di harap bantuan sosial dapat tepat sasaran dan akurat.

g. PT POS INDONESIA

PT Pos bertugas sebagai penyalur di lapangan terkait Bantuan sosial langsung kepada KPM. Baik yang bisa hadir maupun yg belum bisa hadir langsung.

2. Informasi bersifat Formal dan publik.

Informasi mengenai kebijakan Bantuan Langsung Tunai BBM sebelum disampaikan kepada masyarakat hal ini disampaikan terlebih dahulu oleh kementerian Sosial dan di berbagai media cetak maupun elektronik. Alur mengenai informasi BLT BBM Awalnya di Umum Oleh Kemenkeu dan kemudian disalurkan ke Kemeterian Sosial Kemudian ke Dinas Sosial kemudian disalurkan ke kecamatan, baru dari kecamatan disalurkan ke kelurahan. Penyampaian di tingkat kelurahan dengan cara membagikan pengumuman baik di media sosial dan media cetak seperti whatsapp dan surat resmi yang di kirim ke masing masing RT dan RW yang ada lingkungan kelurahan wates sehingga informasi dapat di ketahui masyaarkat banyak bersifat publik serta pendistribusiaan yang di laksanakan di kecamatan sehingga masyarakat dapat memantaau jalanya penyaluran bantuan langusng tunai BBM.

Gambar 5.1



Sumber : <https://www.kompas.tv/article/327510/pemberian-perdana-blt-bbm-di-kota-semarang>

Gambar di atas adalah salah satu bukti bahwa program BLT BBM di sampaikan secara Publik melalui media nasional sehingga yakni masyarakat luas dapat mengetahuinya melalui media internet yang mana seluruh masyarakat data mengases berita tersebut melalui website dan dapat mengetahui kebenaran dan keaslian akan berita tersebut dengan mengumpulkan berita berita yang sama dari berbagai media cetak maupu media online lainnya. dimana di kecamatan ngaliyan akan di lakukan tahap pertama serentak di akhir bulan ini menyesuaikan dengan petugas pos indonesia sebagai tangan kanan pemerintah dalam distribusi blt bbm.

“saya alhamdulillah senang ketika membaca surat undangan dan membaca grup WA dari Kelurahan bahwa Kecamatan Ngaliyan akan mendistribusikan bantuan Langsung tunai BBM karena pada masa seperti ini suami saya seorang supir grab yang setiap harinya di jalan terus sehingga membutuhkan bbm yang lebih dari orang lain pada umumnya”(Wawancara ibu DN penerima bantuan Langsung tunai bbm tanggal 23 September 2022)

Informasi Terkait BLT BBM di tingkat kelurahan Juga di Beritakan Melalui Surat yang di edarkan kepada RT dan RW juga via grup wa di mana hal ini memudahkan para penerima blt untuk megetahui informasi program bansos BLT BBM akan dilaksanakan kapan dan dimana.

3. Pendistribusi Bersifat Sumber Daya manfaat bagi Masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai BBM merupakan bagian dari perlindungan sosial dan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi maka tujuan penyaluran bantuan Langsung tunai BBM pun tidak lain adalah untuk menjaga dan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia dan Berdampak Pada perekonomian nasional. Bantuan Langsung Tunai BBM Di berikan kepada warga yang masuk dalam Data DTKS Dinsos Kota Semarang Sehingga diharapkan mampu tepat sasaran.

Bantuan tunai langsung merupakan bagian dari jaminan sosial dan pengeluaran wajib untuk mengendalikan dampak inflasi pada tahun fiskal 2022. Tujuan penyaluran bantuan tunai hanyalah untuk melindungi dan melindungi yang paling rentan dari kerentanan agar mereka tidak dapat bertahan hidup. Kenaikan harga

BBM secara langsung mempengaruhi pertumbuhan transportasi dan logistik. Harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya juga meningkat. Ini mengurangi nilai uang. Serta Kenaikan harga transportasi akan memicu naiknya harga berbagai kebutuhan.

Masyarakat kalangan menengah ke bawah akan paling merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kenaikan BBM rupanya juga berimbas pada sektor industri. Dalam kondisi ini, BBM akan sangat berdampak pada kenaikan biaya operasional perusahaan. Akibatnya, perusahaan bisa meminimalisir biaya operasional, misalnya melakukan pemangkasan karyawan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tengah dialami oleh para pekerja ojol. Ketika daya beli masyarakat turun, para pedagang dan ojol akan mengalami dampak penurunan pendapatan. Jika kondisi ini terus berlangsung, banyak usaha yang akan tutup karena mengalami kebangkrutan. Sementara para pekerja ojol akan menganggur. Semakin tinggi angka pengangguran, maka negara akan dipenuhi dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan.

“tentunya bantuan Langsung tunai ini disambut baik mas oleh masyarakat, meskipun beberapa masyarakat itu nggak senang karena adanya bantuan sosial tunai karena mereka yang nggak senang itu biasanya tuh karena mereka nggak dapat bantuan sosial tunai jadi nama mereka mengajukan tak tercantum. Bantuan langsung tunai ini juga di himbau oleh PT Pos agar di gunakan untuk keperluan bahan bakar minyak akan tetapi kita dari kelurahan tidak bisa memantau apakah uang ini di belikan bbm atau keperluan lain jadi bisa di katakan tidak ada sangsi ataupun atauran bakunya bagi yang melanggar aturan tersebut.” (Wawancara Ibu Nurikha Kasi Kesos Kelurahan Wates tanggal 23 September 2022)

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Nurikha, bahwasanya bantuan Langsung tunai ini mudah diterapkan kepada masyarakat, karena bantuan Langsung tunai BBM memberikan keuntungan atau manfaat kepada warga di Kelurahan Wates yang pada masa Kenaikann BBM ini perekonomiannya terdampak. Masyarakat mengaku bahwasanya bentuk bantuan ini sangat bermanfaat untuk keluarga mereka karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal ini khususnya membeli bahan bakar minyak. Dengan hal tersebut pelaksanaan bantuan Langsung tunai yang dilaksanakan Oleh Kemensos ini mudah diterapkan. Hal ini berkaitan erat dengan teori Politik Distributif Susan C stokes bentuk Programatis yakni kriteria formal dari distribusi

harus benar-benar membentuk distribusi manfaat atau sumber daya yang sebenarnya yang di butuhkan masyarakat.

4. Politik Distributif Non Programatis

a. Kebijakan Politik Pork Barrel

Dalam hal Ini Kebijakan BLT BBM adalah kebijakan langsung dari pemeritahan pusat dan anggarannya pun berasal dari negara .yakni melalui kementrian keuangan sebagai penganggar dana bantuan, Kementrian Sosial sebagai pelaksana. BLT BBM pula merupakan program kompensasi pemerintah jangka pendek yang tujuan utamanya membantu masyarakat miskin, khususnya rumah tangga miskin, karena dampak inflasi sangat berbahaya. (Wibawa, 1994).

Subsidi Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) ini merupakan subsidi pemerintah untuk mengurangi dampak inflasi dan juga kenaikan harga BBM nasional dalam bentuk bantuan dana desa kepada keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapat BLT BBM. BLT BBM akan diberikan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp300.000. Penyaluran dilakukan pada September dan akan dilanjutkan pada November 2022. BLT BBM ditujukan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang menerima pembayaran tunai dari pemerintah untuk sedikit mengurangi dampak finansial dari kenaikan harga BBM. Keluarga Misikin di sini di artikan sebagai KPM atau warag yang datanya masuk dalam DTKS. (PPN/Bappenas, 2020)

Di Kota Semarang, terdapat 47.221 keluarga penerima manfaat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Pemanas (BBM) yang berjumlah 150.000 per bulan dan mulai disalurkan pada September. Tunjangan subsidi bansos pemerintah pusat, diberikan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM. Departemen Kesejahteraan Sosial telah mengumumkan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anggaran BLT BBM 2022 yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia sebesar Rp12,4 triliun . (KotaSemarang.go.id)

Dalam penyaluran BLT BBM mulai dari pendataan, peneliti mengidentifikasi bahwasanya telah terjadi Model Distrbusi Politik yang sedikit bervariasi dari keluarahan lain yang pada umumnya hanya melibatkan PSM dan

RT RW dalam Penyaringan dan pendataan warga KPM, Terdapat peran dari Lembaga non kelurahan yakni ibu ibu PKK yang turut serta dalam proses penyeleksian warga yang berhak menerima manfaat. Hal ini dibenarkan oleh bu lurah dalam wawancara peneliti.

“njih mas dalam pelaksanaan penyeleksian warga yang berhak menerima bantuan, kami juga menerima pendapat dari ibu ibu pkk. di hari jumat setelah pengecekan jentik rutin kami biasa berkumpul di rumah pak rt atau warga tempat yang bersedia rumahnya di tempati untuk diskusi, berkumpul dan membahas terkait daftar nama nama yang benar benar membutuhkan diskusi tersebut biasa di pimpin langsung oleh bu kasi kesos, saya sebagai lurah hanya sambutan dan memberikan beberapa masukan saja, kami minta tolong ibu ibu PKK juga karna belajar dari ketidak tepatan seperti tahun kemarin terjadi lagi di tahun ini, kepemimpinan saya selaku lurah baru. (Wawancara Ibu Sofi Lurah Kelurahan Wates tanggal 23 September 2022)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bu lurah bahwa dalam program Pendataan KPM yang Berhak Menerima BLT BBM ini, terdapat Peran Kasi kesos, PSM Kelurahan, RT RW dan Ibu Ibu PKK yang menjadi non kelurahan yang turut andil dalam proses penyeleksian warga yang berhak menerima manfaat, hal ini karnakan keterbatasan RT RW dan PSM dalam Peninjauan langsung sehingga Ibu ibu PKK di minta pendapatnya Karna PKK bersinggungang langsung dengan warga setiap harinya sehingga mengetahui keseharian dan aktivitas warganya. Kemudian adanya Juga Forum Sebagai diskusi Untuk Meninjau Kembali data yang di dapat oleh Kasi Kesos, yakni yang di ikuti oleh PKK, dan biasanya dilaksanakan Ketika selesai pengecekan rutin jentik setiap hari jumat.

“iya mas biasa ketika saya mendapatkan informasi dari kecamatan akan adanya program bantuan sosial, saya megajak ibu ibu pkk untuk diskusi selepas kegiatan jentik, guna untuk penyegaran data warga yang berhak menerima bansos dan masuk dalam data dtks, kami melibatk pkk alasannya karna kejadian tahunn lalu mas..kurang tepat sasaran jadi banyak warga yang ke kelurahan atau ketemu di jalan matur dengan saya, bu kok saya ndak dapet!, dengan adanya protes kami evaluasi dan kami jelaskan dengan warga akan hal tersebut dengan baik dan sopan mas” (Wawancara dengan Bu Nurikha Kasi Kesos Kelurahan Wates)

Dalam pelaksanaan forum penyeleksian yang di ikuti ibu ibu PKK, terkesan bahwa suara Kelompok ibu ibu PKK lebih Istimewa dan disetujui oleh Kasi Kesos, dari pada data yang di dapat RT dan RW yang juga menjadi basis utama warganya. Alasan Bu Lurah Mengambil Langkah Ini Karna Selama Ini

kelurahan tidak jarang menemukan bahwa tidak tepat sasaran bantuan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Diduga adanya politik kekerabatan, Seperti contohnya Ketika Pembagian BST Pada masa transisi Covid 19 menuju new normal.

Keberpihakan Keluarahan kepada Ibu Ibu pkk di dasari karna ibu ibu PKK juga bersinggungan langsung dengan warganya dan juga terkesan lebih objektif dalam memberikan keterangan di lapangan, Serta Keaktifan Ibu Ibu PKK dalam Pelaksanaan Kegiatan Program Kesejahteraan Sosial yang ada di Kelurahan Wates Sehingga dapat membantu jalanya program kerja di Kelurahan. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu ibu PKK Menjad, Penentu Akhir dan Penyaring akhir dari apakah warga tersebut Berhak atau tidaknya menerima bantuan dan masuk dalam data DTKS.

“Penyegaran atau pebahrauan data setiap bulanya ada mas, teruama ketika mendekati event bansos seperti blt bbm dari pembahruan ini ada masyarakat yang dikurangi atau di tambahkan karna syarat dari penerima blt bbm adalah masuk data dtks, dihilangkan karena sudah meninggal atau sudah berpindah domisilinya atau ekonominya sudah membaik. tetapi bagi penambahan jumlah penerima blt bbm atupun calon penerima itu kami tidak tau karna blt bbm ini kan baru ada lagi setelah sekian lama hilang jadi yang mengetahui mungkin dingsos. Dan yang tidak dapat biasanya namanya tak teracantun di dtks ”(Wawancara dengan Bu Nurikha Kasi Kesos Kelurahan Wates 17 April 2023)

Kebijakan Kelurahan Mengenai Keterlibatan ibu ibu PKK dalam pelaksanaan pendataan warga yang berhak menerima bantuan atau KPM, berdampak juga pada para penerima Bantuan Sosial Khususnya BLT BBM ini yang di mana di anggap sebagai masyarakat menuju kearah yang lebih baik atau sebaliknya yakni kurang baik.

“Aku reti mas ono Bansos BLT BBM, aku mbiyen mas dapat Bantuan BST tapi saiki ora dapet meneh padahal wes ngajuke ke pak RT, yo mungkin karna aku di anggap orang punya, karna memang sekarang sudah ada kerjaan bedo cerita pas pandemic. tapi aku ra masalah sih mas mungkin ada yang lebih membutuhkan” (Wawancara dengan Bapak FS warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai)

Dari hasil wawancara dengan Pak FS beliau adalah seorang yatim yang baru dua tahun lulus SMA dan harus membiayai adiknya yang masih sekolah. kedua orang tuanya meninggal Ketika masa pandemic covid 19 yang mana Ketika itu ia mendapatkan bantuan bansos dan masuk dalam data DTKS. Dan

setelah ada penyegaran data DTKS, ia tak masuk dalam data penerima bantuan sosial khususya BLT BBM ini. Jika dilihat dari kaca mata peneliti seharusnya pak FS berhak masuk dalam data DTKS yang lebih di prioritaskan. akan tetapi karna keberpihakan pihakan lurah baru sehingga yang di utamakan adalah warga dari rw 02. Yang mana dia naggap peneliti kurang urgent

TABEL 1. Penerima BST

RUKUN WARGA	PENERIMA
RW 01	11
RW 02	8
RW 03	12
RW 04	7
RW 05	6
JUMLAH	44 WARGA

Sumber : Data Kel. Wates

Tabel di atas adalah data Penerima BST Pada Pertengahan tahun 2020 yakni sebelum terjadinya penyegaran data dan kepemimpinan baru setelah adanya kepemimpinan baru ada perubahan

“Untuk penerima Bansos BBM ini mas rata rata yang mendapatkan adalah warga rw 02 dan rw 03 yang mana kesulitan dan membutuhkan bantuan bansos karna daerahnya bukan perumahan mas melaikan perkampungan yang memang banyak lansia di sana dan sesuai dengan persyaratan DTKS. Bansos BBM kemarin, dari wates ada 41 penerima dari 65 orang yang kami ajukan. (Wawancara Bu Nurikha Kasi Kesos Keluarahn Wates 23 September 2022)

Dari pernyataan Bu Anna Bahwa Rata rata warga yang mendapatkan adalah warga rw 02 dan rw 03 dimana hal ini sedikit peniliti kritisi karna daerah rw 02 dan rw 03 ini adalah daerah basis tokoh masyarakat yang berpengaruh dan juga sebagai tempat tinggal para petani jambu kristal yang memang menjadi basis pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Wates Selain Pasar. Serta yang peneliti lihat Keaktifan Ibu Ibu PKK khususnya PKK RW 03 lebih cenderung dibandingkan ibu ibu PKK RW lainnya. Ketika dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Khususnya. Tapi di samping itu memang bahwa daerah tersebut dapat di katakan layak untuk mendapatkan bantuan. Dan terdapat 41 orang

penerima. RW 02 Empat Belas warga, RW 03 Enam Belas Warga, RW 01 Lima warga, RW 04 Empat Warga dan RW 05 Dua warga.

TABEL 2 Penerima BLT BBM Tahap 1&2

RUKUN WARGA	PENERIMA
RW 01	5
RW 02	14
RW 03	16
RW 04	2
RW 05	2
JUMLAH	41 WARGA

Sumber : Data Kel.Wates

Setelah mendapatkan informasi terkait adanya dominasi penerima BLT BBM Berasal dari RT dan RW 03 dan RW 02, Peneliti melakukan survei langsung ke lapangan dan mewawancarai salah satu warga yang menerima BLT BBM. Yakni ibu DN.

“Bukan hanya BLT BBM mas kemarin juga di kecamatan ada bansos sembako, setiap ada BLT dan BST Alhamdulillah saya dapat bantuan. Dan mengambil langsung dikecamatan, nek tetangga saya kemarin dapat juga tapi tidak ada di rumah, dan saya di infokan ibu PSM untuk mengabari bahwa orang tersebut dapat BLT BBM dan nanti bisa mengambil di kantor pos jerakah.”(Wawancara dengan Ibu DN)

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti bahwa ibu DN adalah seorang lansia yang memiliki dua orang anak dimana beliau bekerja sebagai tukang cuci keliling. Dan dilihat dari kondisinya rumah beliau memang memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori warga yang status sosialnya kurang baik dan cocok untuk masuk dalam data DTKS.

Di samping itu juga peneliti kembali wawancarai salah satu warga rw 02 yang mendapatkan bantuan akan tetapi ekonominya terlihat baik dilihat dari rumah dan persyaratan yang tidak memenuhi kriteria DTKS yakni Pak FM

“Ngih mas BLT BBM kemarin saya dapat, harapanya bisa dapat terus karnakan kebetulan kerja saja iku sopir. Jadi penggunaan BBMnya banyak. Kalau BST kemarin saya tidak dapat mas.

Jika dihubungkan dengan teori politik distributif, maka terlihat bahwa Program Pendataan KPM BLT BBM memang memiliki keterkaitan dengan strategi elektabilitas Bu Lurah sebagai lurah baru dan juga di samping itu memiliki tujuan agar kelompok tertentu khususnya warga yang ada di rw 03 yang mana letak lokasinya dekat dengan kelurahan dapat ikut serta dalam membantu kegiatan yang ada dikeluarahan. Hal itu tentu saja berkaitan erat dengan pendataan Program BLT BBM sebagai sumber daya yang dialokasikan dan didistribusikan kepada masyarakat dalam hubungan kuasanya dengan pihak lain, khususnya dalam hal ini Lurah. Di mana terdapat perbedaan penerima dan alokasi setelah terjadinya peralihan jabatan dari lurah lama yakni yang masih menangani bst dan lurah baru yang menangani lurah baru. Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi bahwa penerima blt bbm dan bst berbeda padahal kondisi dari masyarakat yang menerima bst masih sama.

Susan Stokes menyatakan bahwa dalam politik distributif, penguasa atau pihak yang berkuasa memiliki keunggulan karena memiliki akses terhadap sumber daya yang didanai pemerintah. Selain itu, karena pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat, mereka lebih dekat dengan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, politik distributif adalah jenis pemahaman bahwa poli Sumber daya dialokasikan secara politik terkait dengan perjuangan politik untuk eksistensi kelompok etnis tersembunyi lainnya, yang melakukan transaksi langsung dengan masyarakat untuk kepentingan pemilu. Namun teori Susan Stokes memiliki keterbatasan, yakni tidak menjelaskan bahwa adanya kepentingan lain selain kepentingan pemilu yakni kepentingan untuk mengsucceskan program kerja yang di miliki oleh incumbent dalam hal ini yang di maksud peneliti adalah seorang Lurah yang mana jabatannya di dapatkan bukan melalui Pemilihan Melaikan di tunjuk oleh Walikota dan Bertanggung Jawab Kepada Camat.

Dari hal itu semua, penulis mengidentifikasi bahwa memang pendataan KPM BLT BBM di Kelurahan Wates merupakan transaksi non-programatis yang bersifat politik pork barrel. Jika diidentifikasi dengan ciri-ciri politik pork

barrel, alokasi Pendataan Warga KPM Program BLT BBM di sudah memenuhi ciri-ciri tersebut Pertama, praktik alokasi ini dilakukan oleh incumbent atau pemangku jabatan, yaitu Bu Lurah yang terduga dinilai Memiliki untuk kepentingan Eksistensi Sebagai Lurah Baru, Keberhasilan Program Kerja dengan melibatkan ibu ibu PKK, Politik Balas budi Karna Ibu Ibu PKK Tealah Aktif dalam Membantu kegiatan Kelurahan

Kedua, alokasi ini menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial yang mana di Wakilkan Oleh PT Pos Sebagai Penyalur BLT BBM dan Kelurahan terlibat secara tidak langsung dalam hal pendataan. dan, Jika ada alokasi khusus tersebut ditanggung oleh publik secara umum, baik melalui dana pusat maupun penerimaan pajak daerah. Ketiga politik pork barrel Menurut Susan c Stokes dalam konteks regional atau regional. Artinya, alokasi dana hanya ditujukan untuk membantu sekelompok orang di lingkungan daerah tertentu .

Kemudian Keempat, Pendistribusian berciri diskrimintanif, sama halnya dengan ciri ketiga, akan tetapi di dalam penelitan ini yang bukan pada pengalokasiannya, akan tetapi partisipasinya dimana suara ibu ibu PKK lebih di dengar dari pada RT dan RW yang menjadi Garda terdapan dalam Wilayah dan Juga Warganya. Keterdugaan lainnya dapat juga daerah sasaran adalah daerah dimana merupakan inti dari suara dukungan, praktik pendataan warga KPM Program BLT BBM di Kelurahan Wates peneliti menduga terdapat sifat group target di mana mengedepankan Wilayah yang memang memiliki hubungan yang baik dengan Kelurahan terutama dalam segi partisipasi dalam kegiatan kelurahan dan kemasyarakatan. Akan tetapi pola group target ini dapat di bantah karna Program Pendataan BLT BBM Ini bersifat Publik dan transparan, dan tidak hanya kelompok tertentu yang dapat bantuan melaikan RW 02 juga mendapatkan bantuan walaupun Warga mereka kurang dalam partisipasi kegiatan kelurahan.

Ciri khas terkahir kelima adalah dalam Politik pork barell tidak memaksa pemilih untuk memilih incumbent untuk memilih petahana. Politik pork barell tidak memaksa pemilihnya untuk memilih petahana karena belum tercapai atau tidak memiliki kesepakatan. Hal demikian menjadi pembeda politik patronase, pork barell ketidaksamaan pada ciri pendapat atau

penerima sumber daya. Hubungan klien juga bersifat mengikat, artinya sumber daya dialokasikan setelah pemilih memilih petahana. Namun, alokasi sumber daya yang diberikan dalam kebijakan pork barrel tidak memaksa pemilih untuk memilih petahana, seperti yang biasanya terjadi pada Sebelum pemilihan umum.

Akan tetapi dalam teori politik Susan C Stokes, memiliki keterbatasan terkait tujuannya dari politik distributif dilakukan. Di mana dalam teori pork barrel hanya tertitik beratkan pada saat pra pemilihan saja, akan tetapi berbeda halnya dengan kejadian yang ada di kelurahan wates di mana semua di luar kepentingan pemilu maupun pra pemilu melainkan kepentingan suatu Lembaga atau instansi dalam hal ini adalah kelurahan wates. dan tidak ada tuntutan dari kelurahan untuk aktif kegiatan kelurahan akan tetapi karena kesadaran PKK RW 03 yang memiliki Wilayah yang dekat dengan Kelurahan serta hal ini juga sejalan dengan model politik bias kepentingan pemilu tak ada di ikuti oleh sangsi kepada pribadi atau kelompok yang mendapatkan sumber daya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Kesimpulan Penelitian kali ini Berdasarkan hasil pengumpulan data serta pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, dengan ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yakni :

Pertama, Menjawab rumusan masalah pertama yakni pada proses mekanisme penyaluran atau pendataan warga yang berhak menerima bansos BLT BBM, terdapat peran serta dari pejabat kelurahan yakni Lurah, Kasi Kesos, Informasi Teknologi, PSM, RT RW, PKK, PT POS Indonesia. Dalam pelaksanaan di lapangan, pembagian bansos BLT BBM di lakukan secara serentak dari 10 kelurahan di kecamatan Ngaliyan Mekanisme yang dilakukan dengan cara mendata warga melalui RT, RW, Kemudian Memberikan data Kepada Kelurahan dan di cek dan saring kembali oleh PSM dan PKK. Terakhir kelurahan memberikan data tersebut kepada Kecamatan untuk di serahkan kepada PT POS Indonesia sebagai pelaksana langsung, dan Kasi Kesos mengumumkannya kepada penerima bansos BLT BBM akan hadirnya bansos.

Kedua, Menjawab rumusan masalah kedua terkait Sudut pandang Teori politik distributif. Politik distributif non programatis yang terlihat pada proses pendataan warga yang berhak menerima bantuan atau masuk dalam Data DTKS terduga telah terjadi distribusi tersegmentasi. Dimana terlihat dari perbandingan data penerima BST dan BLT memiliki kecenderungan alokasi, dimana politik kekerabatan antara kelurahan dengan Ibu Ibu PKK, dan alokasinya pun terbanyak berada pada RW 03 dan RW 02 yang menjadi warga yang aktif PKKnya dan aktif dalam membantu kegiatan Kelurahan juga belum bersedia memberikan data seluruhnya terkait penerima BST dan BLT BBM peneliti hanya di berikan gambaran angka saja. Dilihat dari teori politik programatis yang memiliki dua ciri yakni informasi bersifat publik dan distribusi sesuai manfaat warga, di anggap setengah sesuai karna salah satu ciri dari politik distributif programatis sudah terpenuhi yakni informasi di berikan secara publik sehingga masyarakat tahu akan kebijakan BLT BBM, ciri yang kedua sudah terpenuhi akan tetapi masih memprioritaskan warga tertentu..

B. Saran

Dari hasil pernyataan simpulan di atas yang peneliti temukan dari hasil survei, observasi serta wawancara maka peneliti memiliki beberapa saran yakni :

1. Untuk masyarakat sebaiknya selalu mengkoordinasikan hal yang dianggap kurang jelas kepada RT RW ataupun Kelurahan dan untuk kritik diharap masyarakat menyelesaikan bersama menggunakan hati yang dingin bertujuan supaya tak ada berita keliru antara Kelurahan RT RW ataupun masyarakat sendiri.
2. Kelurahan harus menyebarkan dan memberikan penjelasan menyeluruh tentang bantuan sosial tunai agar tidak ada kesalahpahaman.
3. Untuk meminimalkan potensi diskriminasi sosial, RT RW harus meminta rekomendasi tentang warganya yang terkena dampak kenaikan BBM dari warga di lingkungannya. Mereka juga harus merekomendasikan nama-nama warga yang benar-benar terkena dampak untuk meminimalkan potensi diskriminasi sosial. Dengan demikian, misi kemensos untuk membantu warga dalam masalah keuangan dapat difokuskan pada sepuluh tugas PKK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arima Andhika, R. R. (2020). *Junal Analisa Sosiologi Vol 9 (no.2). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Masa Pandemi Covid-19* , 1-50.
- Binar Dwiyanto, S. U. (2020). , Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Science and Humanities Vol.1 (no. 2)* 1-100.
- Connie Rahakundini Bakrie, M. O. (2022). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Caraka Prabu Vol.6 No.1*, 65-84.
- Denemark, D. (2000). "Partisan Pork Barrel in Parliamentary Systems: Australian Constituency-Level Grants. *The Journal of Politics Vol 62 (no. 3)*:", 896-915.
- Ferejohn, J. A. (1974). *Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation*., Palo alto: Stanford University Press.
- Haliim, W. (2019). Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodama Kota Kediri. *Polistaat Vol.2, No 1*, 11.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.1 No. 2, hal 516*.
- jdih.bappenas.go.id. (2022). *peraturan/detailperaturan/2420*. Jakarta: jdih.bappenas.go.id.
- Kholifah, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas. (2022, September 26). *Tekan Laju Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Berikan BLT BBM untuk Warga Tidak Mampu*. From biz.kompas: <https://biz.kompas.com/read/2022/09/26/081214228/tekan-laju-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-berikan-blt-bbm-untuk-warga-tidak-mampu>
- Kompas.tv. (2022, september 5). *pemberian-perdana-blt-bbm-di-kota-semarang*. From h <https://www.kompas.tv/article/327510/pemberian-perdana-blt-bbm-di-kota-semarang>
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitiann Kuallitaltif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ibrahim Rantau, A. M. (2019). Politik Distributif Dalam Kebijakan Hibah Provinsi Banten. *Ejournal.unis, Vol. 10*. 38-48.
- Mulyana. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novianty, I. (2020). Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 :Studi Kasus Pada Desa Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prosiding senantias, Vol 1. No 1*, 1-50.

- Oktari, R. (n.d.). *Alasan Harga BBM Naik*. From indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/videografis/alasan-harga-bbm-naik>
- Palenewen, J. D. (2014). *Penerapan Patronase dalam Kemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia*. Jogjakarta: Tesis Magister Universitas Gajah.
- Saragintan, A. a. (2016). "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten 2011. *Jurnal Politik: Vol. 2: Iss. 1 artickel 5*, 1-28.
- Scholl, E. L. (1985). *Pork Barrel Politics in the European Parliament: MEPs and the European Regional Development Fund*. Georgia: Emory University.
- Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 126-135.
- semarangkota.go.id. (2022, september 30). *semarangkota*. From semarangkota.go.id: <https://semarangkota.go.id/>
- Stokes, S. e. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism, The Puuzzle Of Distributive Politics*. New York: Cambridge University.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. I. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset .
- Walhyuningsih, S. (2013). *Metode PenelitiaIn Studi Kasus: Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikalsi, daln Contoh PenelitiaInnya*. Madura: UTM Press.
- Walker, P. J. (2010). "Pork Barrel Spending: Is It Unethical?. *Gatton Student Research Publication 2 (Vol.2)*, 5-7.
- Wardani. (2014). *Buku Panduan Pendidikan Pemilihan Tentang Transaksi Politik dalam Pemilu*. Depok: Politik UI.
- Wardani, S. B. (2014). *Buku Panduan Pendidikan Pemilihan Tentang Transaksi Politik dalam Pemilu*. Depok: Politik UI.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. 1994: PT Raja Grafindo Persada.
- Wildan, R. R. (2020). Pemteaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 1*, 90-120.

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1

Dokumentasi dengan Bu Lurah Kelurahan Wates



Lampiran 2

Dokumentasi dengan Kasi Kesos Kelurahan Wates



Lampiran 3

Dokumentasi dengan Bu Anna PSM Kelurahan dan Bu DN Penerima Bansos BBM



Lampiran 4 Dokumentasi dengan RT Bapak Fauzan



Lampiran 6

Dokumentasi Musyawarah Penyaringan Warga Penerima BLT BBM Oleh PKK



Lampiran 7

Dokumentasi Kegiatan Penyaluran BLT BBM di Kecamatan Ngaliyan



Lampiran 8 Leaflet Resmi Info Bansos BBM Oleh Pemerintah Kota Semarang



Lampiran 9 SOP Bansos BLT BBM

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Kepala Dinas Sosial	Kepala Bidang PFM & PKS / Koordinator Kota, Fasilitator	Sekretaris Daerah Kota Bima	Kepala Kelurahan	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian dan tindak lanjut atas Peraturan yang menjadi Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan Bansos BLT BBM Tahun 2022	○					Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan	5 Kali	Hasil Notulensi Rapat
2	Proses penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial BBM Tahun 2022.	○	□				Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022	2 Hari	SK Kepala Dinas Sosial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022
3	Menyampaikan informasi tentang kuota penerima Bantuan Sosial Tunai BBM ke masing-masing Kelurahan dan juga SKPD terkait		□	□			dilampiri dengan Kuota penerima bantuan sosial BBM 2022	1 Hari	Surat Sekretaris Daerah tentang Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai BBM Tahun 2022
4	Kepala Kelurahan menyampaikan usulan penerima Bantuan Sosial Tunai BBM 2022 sesuai dengan persyaratannya.				□		Berita Acara Muskel atau Surat Pengantar Kepala Kelurahan	5 Hari	Usulan Keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai BBM 2022
5	Verifikasi usulan penerima Bantuan Sosial Tunai BBM 2022 sesuai dengan persyaratannya.		□				KTP, KK	2 Hari	Rekapen hasil verifikasi
6	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai BBM Tahun 2022					○	Terlampir bersama BNBA KPM penerima bantuan sosial tunai BBM serta besaran	2 Hari	SK Walikota tentang Penetapan Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak di Kota

Lampiran 10 Wawancara dengan Pos Indonesia



Lampiran 11 Surat Balasan Penelitian.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Muhammad Akbar Ari Pratama
Tempat,Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Oktober 2000
Alamat : Jalan Puma 1F Blok B5 NO 23 Cikarang baru
NIM :1906016063
Prodi : Ilmu Politik
IPK : -
Agama : Islam
Email : m.akbarari2011@gmail.com
Nomor Handphone : 08111632210

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- TK Islam Ramadhani
- SD Negeri Sertajaya 05
- SMPIT Thariq Bin Ziyad Boarding School
- SMAI Al Musim Tambun
- S1- Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non-Formal

- Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Dodik Bela Negara Magelang 2019
- Kursus Dinas Staf Nasional UNRI Oleh KODIM 0303/Bintan Riau 2021
- Pelatihan Pencegahan Satgas Covid 19 Kodim 0733 BS/Semarang 2021
- Kursus Mahir Tembak (Hirbak) Menwa Arteleri Pertahan Udara 15 Jatingaleh 2022

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua UKK Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 906 Sapu Jagad UIN Walisongo Semarang Tahun 2023
2. Wakil Lurah Ponpes Mahasiswa Al Ihya 1 2022

